

**KEPENTINGAN JEPANG TERHADAP INDONESIA DI
BAWAH KERJASAMA BILATERAL *INDONESIA JAPAN*
*ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT 2008-2017***

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) dalam Bidang Hubungan
Internasional**



Oleh :

REFFIDA DYAH ARISHANTI

NIM I92214022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FEBRUARI 2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Reffida Dyah Arishanti
NIM : I92214022
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Kepentingan Jepang terhadap Indonesia di bawah kerjasama bilateral *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement 2008-2017*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar karya saya dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Januari 2019
Saya yang menyatakan,



Reffida Dyah Arishanti
NIM : I92214022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Reffida Dyah Arishanti

NIM : I92214022

Program Studi : Hubungan Internasional

dengan judul "**Kepentingan Jepang terhadap Indonesia di bawah Kerjasama Bilateral Indonesia Japan Economic Partnership Agreement 2008-2017**", saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang hubungan Internasional

Surabaya, 21 Januari 2019
Pembimbing,



Ridha Amaliyah, S.I.P, MBA
NIP. 201409001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh Reffida Dyah Arishanti dengan judul "**Kepentingan Jepang terhadap Indonesia di bawah Kerjasama Bilateral Indonesia Japan Economic Partnership Agreement 2008-2017**" telah dipertahankan dan dinyatakan lulus didepan tim penguji skripsi pada tanggal 28 Januari 2019.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

Ridha Amaliyah, MBA
NIP. 201409001

Penguji II

M. Fathoni Hakim, M.Si
NIP. 198401052011011008

Penguji III

M. Qobidl'Ainul Arif, MA
NIP. 198408232015031002

Penguji IV

Zaky Ismail, M.S.I
NIP. 198212302011011007

Surabaya, 28 Januari 2019

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip. SEA, M.Phil, Ph.D.
NIP. 197402091998031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : REFFIDA DYAH ARISHANTI
NIM : I92214022
Fakultas/Jurusan : FISIP/HUBUNGAN INTERNASIONAL
E-mail address : reffi.dyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KEPENTINGAN JEPANG TERHADAP INDONESIA DI BAWAH KERJASAMA
BILATERAL INDONESIA JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT 2008-
2017

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Februari 2019

Penulis

(REFFIDA DYAH ARISHANTI)

ABSTRAK

Reffida Dyah Arishanti, 2019. Kepentingan Jepang terhadap Indonesia di bawah Kerjasama Bilateral *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* 2008-2017. Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kata kunci : IJEPA, Eksport Impor, Migrasi Pekerja, MIDEC, Kepentingan Nasional

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif dan menekankan penggunaan konsep *national interest* melalui perspektif realis serta *rational choices* untuk melihat kepentingan Jepang terhadap Indonesia dibawah kerjasama bilateral *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* 2008-2017

Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) merupakan bentuk kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jepang yang mengusung konsep *Economic Partnership Agreement* (EPA), *Free Trade Area-New Age* atau yang disebut WTO plus karena kebijakan dan isu yang dibahas melebihi WTO. IJEPA tidak hanya membahas liberalisasi perdagangan tetapi juga migrasi pekerja, upaya peningkatkan daya saing dan sebagainya, yang tidak diatur dalam FTA pada umumnya. Sebagai negara yang memprakarsai IJEPA, nilai perdagangan Jepang cenderung defisit dibandingkan Indonesia yang selalu surplus sejak 2008-2017. Hal tersebut justru membawa keuntungan bagi Jepang dikarenakan pola hubungan yang komplementer. Kepentingan Jepang terhadap Indonesia dibawah kerangka kerjasama bilateral IJEPA adalah (1) Memanfaatkan sumber daya Indonesia berupa minyak bumi dan batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi Jepang (2) Menggunakan pekerja Indonesia yang bergerak dibidang *nurse* dan *careworker* untuk mengatasi permasalahan pertumbuhan lansia di Jepang yang diperkirakan akan terus meningkat (3) Meningkatkan investasi di Indonesia dengan pertimbangan pekerja murah sehingga berimplikasi pada biaya produksi yang semakin kecil (4) Mengambil keuntungan melalui skema pembebasan bea masuk yang ditujukan untuk pengembangan *driver sector* (USDFS) sebagai kompensasi *Manufacture Industries Development Center* (MIDEC). Dengan itu, Jepang mampu mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan ekonomi global yang semakin dinamis, ditambah munculnya pesaing baru yang berpotensi seperti Tiongkok.

ABSTRACT

Reffida Dyah Arishanti, 2019. Japan's interests in Indonesia under Bilateral Cooperation Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement 2008-2017. Undergraduated Thesis Department of International Relations Faculty of Social and Political Sciences State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya.

Keyword: IJEPA, Import and Export, Worker Migration, MIDECA, National Interest

In this study, researchers used a qualitative research approach and exploratory methods then used two main concept namely the national interest by emphasizing the perspective of realism and rational choices to see Japan's interests in Indonesia under Bilateral Cooperation Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement 2008-2017.

Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), a form of bilateral cooperation between Indonesia and Japan that carries the concept of the Economic Partnership Agreement (EPA), the Free Trade Area-New Age which is WTO plus because the policies and issues discussed exceed WTO. IJEPA does not only discuss trade liberalization but also the movement of natural persons, increasing competitiveness and so on, which are not regulated in FTAs in general. As a country that initiated IJEPA, Japan's trade value tended to be a deficit compared to Indonesia, which had always been surplus since 2008-2017. The value of trade deficits is not a big problem for Japan, because on the other hand, Japan has more benefited because of the complementary pattern of relations. Japan's interest in Indonesia under the framework of the bilateral cooperation of IJEPA is (1)Utilizing Indonesia's resources like oil and coal to meet Japan's energy needs (2) Using Indonesian workers engaged in nurses and careworkers to overcome the problem of growing elderly in Japan, (3) Increasing investment in Indonesia with consideration of low-cost workers so that it has implications for lower production costs (4) Taking advantage through an import duty exemption scheme intended for driver sector development (USDFS) as compensation for Manufacture Industries Development Center (MIDEC) With that, Japan is able to maintain its existence amid the increasingly dynamic global economic competition, especially the emergence of new competitors like Tiongkok.

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
LEMBAR KEASLIAN	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR BAGAN	xix
DAFTAR GRAFIK.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. RumusanMasalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Penelitian Terdahulu	13
F. Definisi Konseptual	19
G. Argumentasi Utama	23
H. Sistematika Pembahasan	25

BAB II KAJIAN TEORI.....	27
A. National Interest.....	27
B. Rational Choice	32
 BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
C. Subjek Penelitian	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Teknik Analisa Data	42
F. Alur Penelitian.....	44
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Sejarah Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang	46
A.1 Hubungan Indonesia Jepang Pra-Kemerdekaan	46
A.2 Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang Pasca Kemerdekaan...	51
A.3 Hubungan Indonesia Jepang Masa Orde Lama-Orde Baru....	53
A.4 Hubungan Indonesia Jepang di Era Reformasi	56
B. Economic Partnership Agreement	59
B.1 Sejarah <i>Economic Partnership Agreement</i>	59
B.2 Kebijakan Tarif yang di atur dalam EPA.....	61
C. Kepentingan Jepang dalam IJEPA.....	63
C.1.Peningkatan Kinerja Perdagangan dengan menerapkan penghapusan dan pengurangan tarif dalam ekspor impor barang ...	64
C.2.Peningkatan Investasi Jepang.....	72
C.3. Pengiriman Tenaga Kerja Ahli <i>nurse</i> dan <i>careworker</i>	74
C.4. Peningkatan Daya Saing melalui MIDEC	79

D. Tinjauan Konsep National Interest dan Rational Choice	81
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

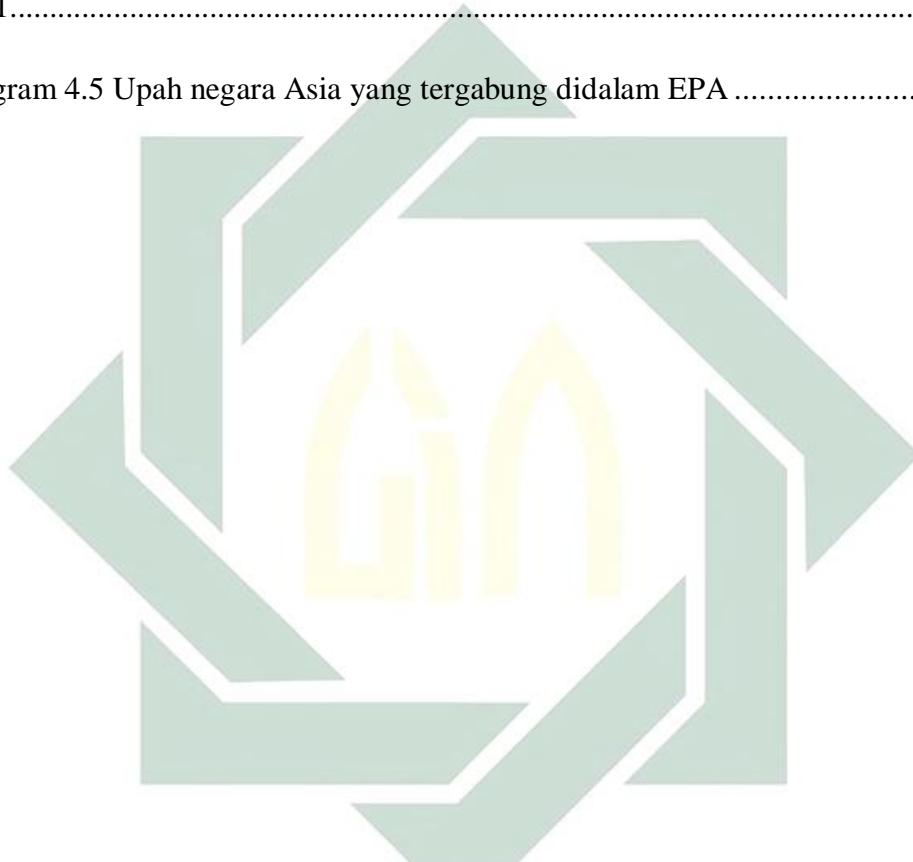
Gambar 1. 1 Japan's current status of EPA Negotiations	2
Gambar 1.3 Perbedaan WTO dan EPA.....	7

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Perbedaan EPA dan FTA	5
Tabel 3.1 Rencana Kegiatan Penelitian	39

DAFTAR BAGAN

Diagram 4.3 Total ekspor batu baraIndonesia ke Jepang 2008-2015.....	67
Diagram 4.4 Perubahan struktur kebutuhan energi primer Jepang tahun 1951-2001.....	70
Diagram 4.5 Upah negara Asia yang tergabung didalam EPA	73



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.4 Jumlah ekspor Jepang ke Indonesia pada periode 2009-2017.....	9
Grafik 1.5 Nilai ekspor impor Jepang 2000-2008	11
Grafik 4.1 Tren perdagangan Indonesia Jepang 2008-2017	65
Grafik 4.2 Ekspor minyak bumi Indonesia ke Jepang 2008-2017	66
Grafik 4.6 Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Jepang 2008-2017	77



BAB I

PENDAHULUAN

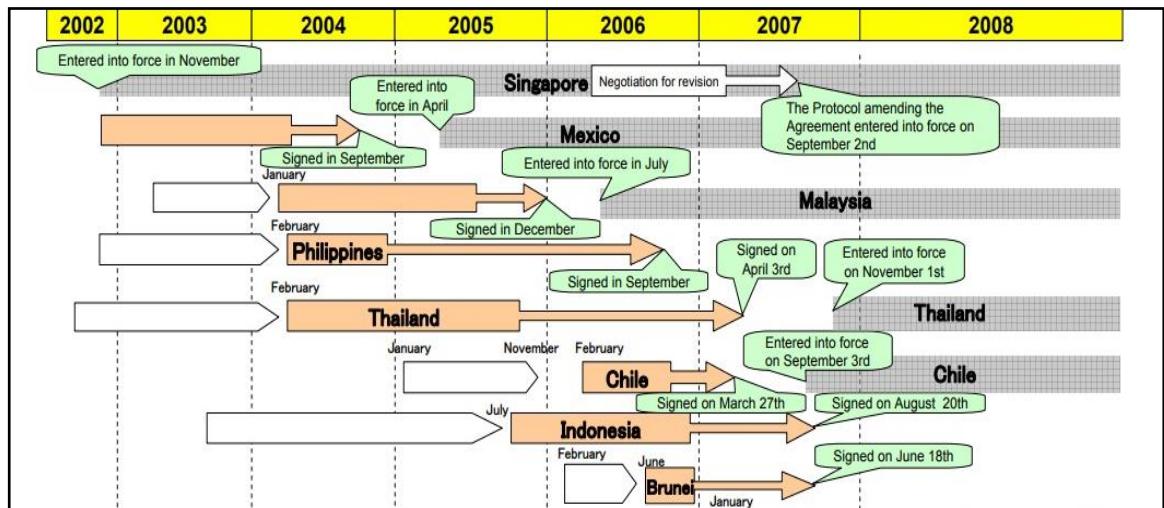
A. Latar Belakang

Economic Partnership Agreement (EPA) merupakan bentuk kerjasama dibawah payung besar perdagangan bebas yang mulai diterapkan oleh Jepang sejak tahun 2000.¹ EPA merupakan langkah preventif Jepang untuk menanggapi perdagangan global agar tidak semakin terpuruk dan tertinggal karena dinamika perdagangan global yang semakin kompleks dan cepat. Tercatat ada 8 negara yang digandeng Jepang untuk melakukan kerjasama dibawah kerangka *Economic Partnership Agreement* (EPA) yaitu, Mexico dan Chili serta 6 negara lainnya yang merupakan negara anggota ASEAN diantaranya, Singapura yang resmi menandatangi EPA pada tahun 2002, Malaysia pada tahun 2005, Philipina pada tahun 2006, serta disusul 3 negara lainnya yakni Thailand, Brunei Darussalam serta Indonesia pada tahun yang sama yakni 2007.² Di bawah kerangka EPA, Jepang melakukan beberapa langkah negosiasi hingga penerapan kerjasama.

¹MOU. Japan's Economic Partnership Agreement. 2008. [Internet] http://www.customs.go.jp/english/epa/files/japans_epa.pdf diakses pada 5 Juni 2018

²Kedutaan besar Jepang di Indonesia. [Internet] terdapat pada [http://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html] diakses pada 12 Maret 2018

Gambar 1.1Japan’s Current Status of EPA negotiations



Sumber : Customs & Tariff Bureau MOF

Keterangan : Perundingan Awal

Dalam Negosiasi

Mulai diterapkan

Singapura mulai menerapkan *Japan-Singapura Economic Partnership*

Agreement (JSEPA) pada tahun 2002, kemudian mengalami periode negosiasi untuk revisi pada tahun 2006-2007 dan mulai diterapkan lagi setelah melalui proses revisi pada September tahun 2007. Kemudian mexico dengan *Japan Mexico Economic Partnership Agreement* (JMEPA) melalui proses negosiasi kurang lebih selama 3 tahun yakni tahun 2002-2004 dan disepakati pada September 2004, setahun setelahnya yakni tahun 2005 JMEPA mulai diterapkan. Selanjutnya Malaysia dengan *Malaysia Japan Economic Partnership Agreement* (MJEPA) yang melalui tahap negosiasi sejak Februari 2004 hingga Desember 2005, baru menyepakati pada Juli 2006 dan mulai diterapkan pada saat itu juga. Philipina, salah satu negara yang juga dibidik

Jepang dengan pembentukan *Japan Philippine Economic Partnership Agreement* (JPEPA) dengan melalui tahap perundingan dimulai sejak Februari 2004 dan disepakati pada September 2006. Negara Asia tenggara lain yang dibidik Jepang adalah Thailand, dengan dibentuknya *Japan Thailand Economic Partnership Agreement* (JTEPA). Proses perundingan dengan memakan waktu yang cukup lama dibandingkan negara-negara lainnya yakni pada Februari 2004 dan disepakati pada April tahun 2007. Negara lain yang juga diikat Jepang adalah Chili, bersama Chili, Jepang membentuk *Japan Chili Economic Partnership Agreement* (JCEPA) dengan proses perundingan hingga penandatanganan memakan waktu yang cukup singkat, yakni dimulai pada Februari 2006 dan disepakati pada Maret 2007. Kemudian disusul negara Indonesia dan Brunei. Brunei dibidik Jepang dengan membentuk *Brunei Japan Economic Partnership Agreement* (BJEPA), proses perundingan Jepang dengan Brunei berlangsung cukup singkat, berbeda dengan negara Asia Tenggara lainnya, proses pembentukan BJEPA adalah yang paling cepat, dimulai pada Juni 2006 dan sepakati pada Juni 2007.

Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) diinisiasi Jepang dengan mengajukan proposal pembentukan oleh Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi kepada Presiden Megawati ketika Presiden Megawati berkunjung ke Tokyo pada tanggal 22-25 Juni 2003.³ Kemudian, perundungan resmi IJEPA disetujui oleh Pemerintah Indonesia dan Jepang

³Nuthaila Rahmah. 2017. Hubungan Indonesia – Jepang dalam Perjanjian *Indonesia-Japan Economic partnership Agreement* di bidang Pertanian. Skripsi mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial & Politik. Universitas Hasanuddin.

ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Jepang dengan resmi pada bulan Juni 2005. Pada tanggal 20 Agustus 2007 Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe datang ke Indonesia untuk menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan menandatangi surat persetujuan kerjasama tersebut. Perjanjian bilateral IJEPA disahkan melalui Peraturan Presiden No. 36 tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Pengesahan *Agreement Between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi).⁴ IJEPA kemudian diberlakukan secara efektif dan mulai diimplementasikan pada tanggal 1 Juli 2008.⁵

Dalam perjanjian IJEPA, kedua negara menyepakati bidang-bidang perekonomian, yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, serta sumber daya energi dan mineral. Perjanjian ini mencakup sebelas kelompok perundingan, yakni *Trade in Goods, Rules of Origin, Customs Procedures, Trade in Services, Investment, Movement of Natural Persons, Government Procurement, Intellectual Property Rights, Competition Policy, Energy and Mineral Resources, and Cooperation*.⁶

IJEPA merupakan kerjasama ekonomi antara pemerintah Indonesia dan Jepang yang lebih komprehensif dibandingkan dengan WTO. Hal tersebut

⁴Fitri T.B dkk. 2012. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan - Analisis Dampak Indonesia Japan Economic Partnership Agreement terhadap *Price-Cost Margins* Industri Manufaktur Indonesia. Vol. 15 No. 2

⁵Kedutaan besar Jepang di Indonesia. [Internet] terdapat pada [http://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html] diakses pada 12 Maret 2018

⁶A Komala. 2008. *International Law Making*. Jurnal Hukum Internasional – *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*. Vol 5 no 2, hal.373

dikarenakan kesepakatan yang diberikan di dalam IJEPA lebih tinggi dibandingkan dengan kesepakatan yang diberikan di dalam WTO, oleh karena itu kesepakatan IJEPA ini juga sering dikenal dengan sebutan WTO-plus.⁷

Pada dasarnya konsep EPA sendiri memberikan keuntungan berupa penghapusan tarif yang dibebankan antara negara atau kawasan dan untuk menghapus peraturan dalam bidang penanaman modal asing pada bidang jasa perdagangan.⁸ Adapun perbedaan antara FTA yang diterapkan WTO dan EPA yang diimplementasikan Jepang-Indonesia melalui IJEPA adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Perbedaan EPA dan FTA

No.	Yang diatur	Free Trade Agreement (FTA)	Economic Partnership Agreement (EPA)
1.	Memfasilitasi bergeraknya SDM	Tidak	Ya
2.	Penghapusan atau penurunan tarif	Ya	Ya
3.	Kerjasama diberbagai bidang	Tidak	Ya
4.	Penghapusan pembatasan penanaman modal asing dalam perdagangan jasa	Ya	Ya

⁷Khoir Udin. 2013. *Economic Partnership Agreement* (EPA). [Internet] terdapat pada http://www.academia.edu/18499705/Economic_Partnership_Agreement_EPA diakses pada 12 Maret 2018.

⁸Kementerian Keuangan. 2009. IJEPAP (*Indonesia Japan Economic Partnership Agreement*). Jakarta: Kemenkeu

4.	Pembentukan aturan investasi	Tidak	Ya
5.	Investasi hak kekayaan Intelektual serta aturan kebijaksanaan persaingan	Tidak	Ya

Sumber : Diolah oleh penulis

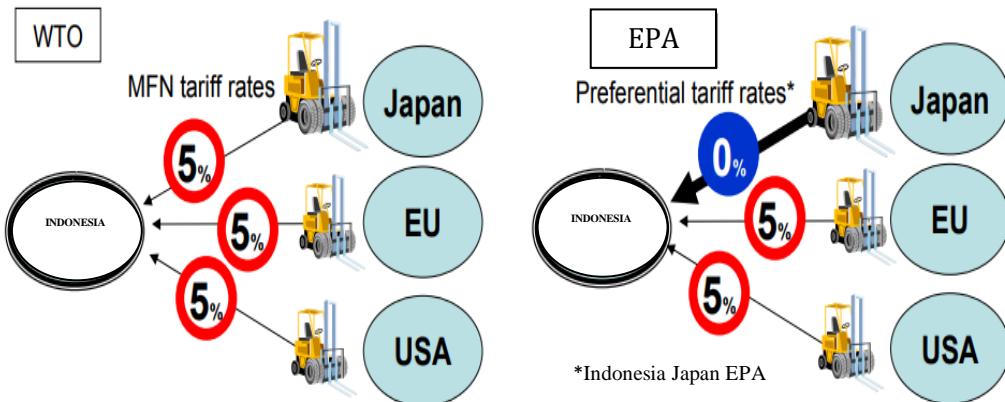
Penerapan *Economic Partnership Agreement*, dianggap sebagai *building block* sekaligus *stumbling block* dari World Trade Organization (WTO). Di satu sisi, *Economic Partnership Agreement* dianggap sebagai *building block* karena EPA merupakan salah satu cara pengedukasian terhadap negara-negara khususnya negara kawasan Asia tenggara mengenai konsep negosiasi kerjasama yang lebih kompleks diberbagai bidang.⁹ Di sisi lain, posisi *Economic Partnership Agreement* juga dianggap sebagai *stumbling block* karena dalam penerapannya dianggap melanggar salah satu prinsip WTO yakni *Most Favoured Nations* (MFN).¹⁰ MFN merupakan salah satu asas yang termuat dalam *General Agreement Tariff and Trade* mengenai kebijakan non-diskriminasi, dengan cara tidak membeda-bedakan negara satu dengan negara lain sesama anggota WTO.¹¹

⁹MOF Japan. Japan's Economic Partnership Agreement. 2008. [Internet] http://www.customs.go.jp/english/epa/files/japans_epa.pdf diakses pada 5 Juni 2018

¹⁰Ibid, diakses pada 5 Juni 2018

¹¹World Trade Organization. Legal Text GATT 1947. Part 1 Article 1

Gambar 1.3 Perbedaan WTO dan EPA



Sumber : *Ministry of Finance Japan*

Secara umum, sebenarnya kerjasama *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* hampir sama dengan kerjasama ekonomi Indonesia dengan negara lain. Akan tetapi kelebihan IJEPA dalam hal ini tidak hanya mengatur modalitas penurunan dan penghapusan tarif namun juga mengatur fasilitas bea masuk untuk barang yang diimpor langsung dari Jepang.¹²

Hingga saat ini, Jepang tercatat sebagai mitra dagang dan mitra kerjasama ekonomi yang penting bagi Indonesia. Sebagai mitra dagang utama untuk Indonesia, Jepang memiliki peranan dan kontribusi yang cukup besar bagi neraca perdagangan Indonesia, meskipun dari tahun ke tahun perdagangan Indonesia dengan Jepang tidak selamanya mengalami kenaikan.¹³

¹²Sigit Setiawan. 2015 Analisis Dampak IJEPA terhadap Indonesia dan Jepang (Internet) https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pkrb_03.%20dampak%20ijeпа.pdf diakses pada 24 Oktober 2018

¹³Kemendag. 2015. Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan.

Indonesia sendiri baru terlibat dan tercatat melakukan kerjasama bilateral yang bersifat komprehensif diwujudkan melalui IJEPA ini.¹⁴ Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui pembentukan IJEPA adalah¹⁵ ;

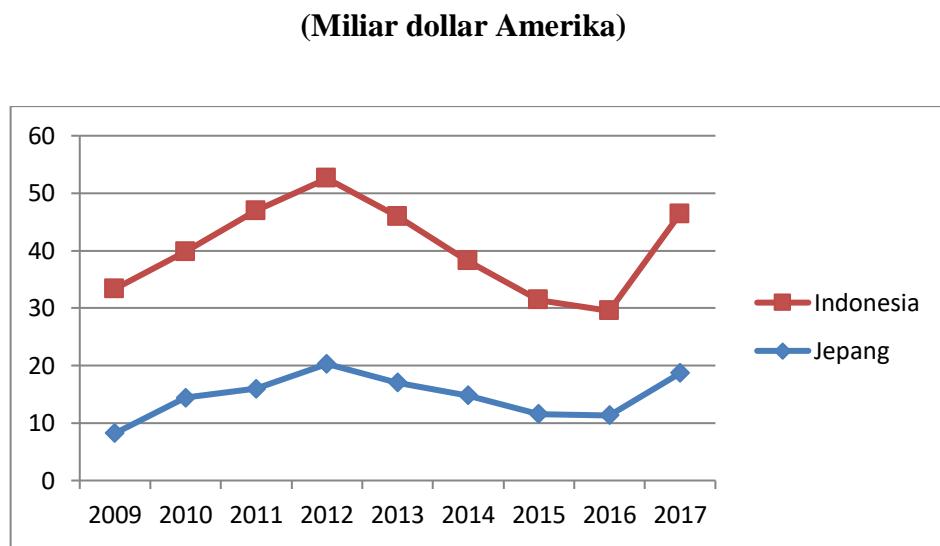
- a. Meningkatkan nilai perdagangan diantara kedua negara
 - b. Mendorong peningkatan investasi Jepang di Indonesia
 - c. Diharapkan mampu mengembangkan industri dan teknologi
 - d. Memperdalam keterlibatan Indonesia dalam jaringan produksi regional dan internasional
 - e. Memperluas lapangan pekerjaan

Sejak diimplementasikannya kerjasama bilateral *Indonesian Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) 1 Juni 2008 hingga tahun 2017 dinamika perdagangan ekspor dan impor Indonesia Jepang cenderung stabil, dimana presentasi ekspor Indonesia ke Jepang lebih tinggi dibandingkan jumlah ekspor Jepang ke Indonesia.

¹⁴Kemendag. 2018. Factsheet Indonesia Jepang (EPA)

¹⁵. Kedutaan besar Jepang di Indonesia. [Internet] terdapat pada [http://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html] diakses pada 12 Maret 2018

Grafik1.4 Jumlah Ekspor Jepang ke Indonesia pada periode 2009-2017



Sumber : Diolah dari ITPC OSAKA

Tidak ada indikator yang menjelaskan secara pasti mengenai bagaimana tingkat keberhasilan IJEPA diukur, akan tetapi melihat dari jenis kerjasama yang mengarah pada sektor ekonomi yang tujuannya adalah mempermudah perdagangan barang dan jasa sebagaimana tiga pilar yang diusung di dalam IJEPA diantaranya¹⁶ :

1. Fasilitasi Perdagangan dan investasi
 2. Liberisasi: dihapuskannya hambatan perdagangan dan investasi (bea masuk, memberi kepastian hukum)

¹⁶Fitri T.B &Fithra Faisal Hastiadib. Analisis Dampak *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* terhadap *Price-Cost Margins* Industri Manufaktur Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. 15 No. 2 Januari 2015: 192-209

3. Kerjasama: kesepakatan untuk kerjasama dalam meningkatkan kapasitas Indonesia sehingga lebih mampu bersaing dan memanfaatkan peluang pasar dari EPA secara optimal.

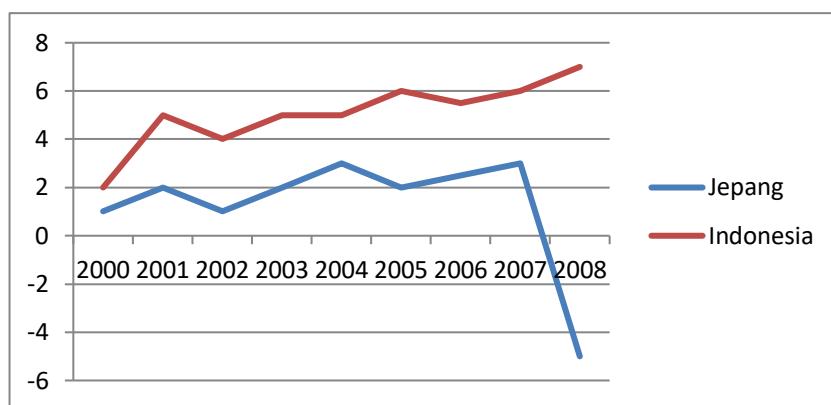
Ekspor dan impor bisa turut berkontibusi sebagai salah satu indikator keberhasilan IJEPA, karena implementasi dari ketiga pilar tersebut bisa direfleksikan pada fenomena ekspor dan impor, penekanan ekspor dan impor sebagai indikasi berhasil atau tidaknya IJEPA ini juga sejalan dengan tujuan dibentuknya kerjasama ekonomi diantaranya¹⁷:

1. Memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara
 2. Meningkatkan produktivitas dalam negeri
 3. Meningkatkan pendapatan melalui ekspor

Dari berbagai fakta tersebut peneliti melihat adanya GAP dimana sebagai negara penginisiasi IJEPA, Jepang justru mendapatkan tingkat perdagangan yang lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Dimana posisi Jepang selalu defisit dibanding Indonesia. Disisi lain, sebelum adanya kerjasama komperhensif dalam bentuk IJEPA, nilai perdagangan Indonesia dan Jepang juga menampakkan fakta yang sama. Yakni nilai perdagangan Indonesia ke Jepang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai perdagangan Jepang ke Indonesia.

¹⁷Apridar dalam Levi Gocklas & Sri Sulasmiaty 2017. Analisis Pengaruh Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Terhadap Nilai Perdagangan Indonesia-Jepang.

Grafik 1.5 Tren Perdagangan Indonesia-Jepang 2000-2008



Sumber : *International Monetary Fund*

Dengan kata lain tidak ada perubahan nilai perdagangan baik sebelum maupun sesudah IJEPA diimplementasikan, itu berarti pada dasarnya terdapat kepentingan dan keuntungan lain yang didapatkan Jepang.

Oleh karena itu peneliti tertarik membuat judul penelitian yang berkaitan dengan Kepentingan Jepang Terhadap Indonesia dibawah Kerjasama Bilateral *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* 2008-2017 dengan menggunakan pintu masuk nilai perdagangan Indonesia Jepang setelah IJEPA diimplementasikan.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ditemukan peneliti terkait beberapa fakta yang telah dipaparkan sebelumnya adalah sebagai berikut :

Apa kepentingan Jepang terhadap Indonesia dalam kerjasama *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) 2008-2017?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang akan diteliti, adapun tujuan penelitian adalah :

Untuk mengetahui apa kepentingan Jepang terhadap Indonesia di bawah kerjasama bilateral *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) tahun 2008-2017.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah kajian teoritis diharapkan mampu memberikan sumbangsih positif dalam upaya pengkajian yang dilakukan, tak terkecuali penelitian yang peneliti lakukan kali ini. Pada penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana pengetahuan dan sumber rujukan atau referensi kajian mahasiswa Hubungan Internasional, terutama yang berkaitan dengan kepentingan Jepang terhadap Indonesia dibawah kerangka kerjasama bilateral *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*.

Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hubungan Internasional di era kontemporer seperti saat ini. Serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan luar negeri untuk mencapai suatu kepentingan dalam pelaksanaan hubungan Internasional.

b. Manfaat Praktis

Untuk mengetahui kepentingan Jepang terhadap Indonesia dalam kerangka kerjasama bilateral *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) 2008-2017.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan peneliti kali ini merupakan ide gagasan peneliti yang bersifat orisinil dan belum pernah dikaji oleh peneliti lain sebelumnya. Untuk membuktikan hal tersebut dalam hal ini sangat dibutuhkan adanya penelitian terdahulu.

Penelitian terdahulu merupakan kajian yang sangat penting bagi sebuah penelitian, penelitian terdahulu dibutuhkan oleh peneliti sebagai pedoman dalam mengerjakan skripsi sehingga peneliti setidaknya memiliki acuan demi memudahkan proses penelitian, sekaligus sebagai pembanding orisinil atau tidaknya sebuah penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Skripsi oleh Baiq Rhamdani Fajrianti pada tahun 2017 mengenai *“Strategi Jepang Mempertahankan Perdagangan dan Investasi dengan Indonesia ditengah Problematika Ekonomi tahun 2008-2015”* yang diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan program sarjana S-1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.

Penelitian milik Baiq Rhamdani tersebut menekankan pendalaman dan fokus penelitian pada strategi Jepang mempertahankan perdagangan dan investasi dengan Indonesia ditengah problematika ekonomi yang terjadi kisaran tahun 2008 hingga 2015. Sebagai sebuah negara yang maju dalam bidang teknologi dan industri, menyebabkan banyak negara yang turut ingin bersaing dengan Jepang, khususnya kawasan Asia melalui aktivitas perdagangan. Eksistensi Jepang di kawasan Asia tidak selamanya mengalami kestabilan dikarenakan banyaknya tekanan seiring berlangsungnya era globalisasi, pesaing seperti halnya Tiongkok dan Korea selatan merupakan momok bagi eksistensi Jepang di dunia perdagangan kawasan Asia khusunya. Jepang berupaya menciptakan strategi ekonomi dengan cara membangun hubungan kemitraan dengan negara lain salah satunya Indonesia. Semangat Jepang untuk terus bangkit juga diinisiasi oleh adanya semangat masa lampau ketika kehancuran Jepang pasca adanya nuklir Fukushima. Penelitian tersebut berupaya melihat berbagai bentuk diplomasi ekonomi yang dilakukan Jepang dengan menjabarkan tiga jenis sekaligus strategi diplomasi yang diwujudkan Jepang melalui beberapa bentuk kerjasama diantaranya adalah *Indonesia Japan Economic Partnership* (IJEPA), diplomasi melalui *Indonesi-Japan Steel Dialog* (IJSD) dan juga diplomasi ekonomi melalui *Official Development Assistance* (ODA). Penelitian tersebut menggunakan teori diplomasi ekonomi.

Terdapat kesamaan penelitian dengan penelitian peneliti saat ini. Penelitian yang lakukan oleh Baiq Rhamdani berfokus pada strategi Jepang untuk mempertahankan perdagangan dan investasi dengan Indonesia ditengah Problematika Ekonomi tahun 2008-2015 dengan cara merangkul negara Asia khusunya Indonesia dan memberlakukan beberapa jenis upaya kerjasama sebagai sebuah bentuk strategi dalam menanggapi problematika ekonomi berupa daya saing yang semakin tinggi. Akan tetapi, pembeda penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti kali ini adalah, peneliti tidak berfokus pada satu kerjasama yakni IJEPA. Selain itu, penelitian milik Baiq Ramdhani tersebut hanya berfokus pada periode 2008-2015 tanpa melihat dan menekankan fokus perdebatan pada tingkat ekspor maupun impor Indonesia-Jepang dari tahun ke tahun.

2. Skripsi oleh Derliana pada tahun 2011 mengenai “*Implementasi Indonesia Japan Economic Partnership Agreement Pada Eksport Komoditas Udang Dan Tuna Dalam Sektor Perikanan Indonesia*” yang diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan program sarjana S-1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia, Bandung.

Penelitian oleh Derlina ini merujuk pada salah satu komoditas saja yakni komoditas hasil laut berupa udang dan tuna. Pada dasarnya terdapat 11 bidang atau kelompok perundungan yang ada di dalam IJEPKA dan disebutkan Derlina dalam penelitiannya, akan tetapi

penelitian milik Derlina lebih berfokus pada *Trade In Goods: tariff and non-tariff measures, rules of origin trade remedies* (Perdagangan dalam barang : ketentuan tarif, non-tariff, ketentuan asal produk, serta penyelesaian *dispute* mengenai mutu barang). Dengan menekankan perdagangan barang ekspor hasil laut Indonesia ke Jepang komoditas udang dan tuna.

Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Derlina dengan penelitian ini adalah, sama-sama mengangkat tema besar *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA). Dengan menekankan penggunaan metode penelitian kualitatif. Selain itu, salah satu pertanyaan yang diulas dalam penelitian milik Derlina adalah faktor yang melatarbelakangi mengapa pemerintah Indonesia mau melakukan kerjasama IJEPA bersama dengan pihak Jepang. Berbeda dengan penelitian peneliti saat ini, jika Derlina ingin melihat faktor yang melatarbelakangi Indonesia, peneliti justru berupaya melihat dari sudut pandang dan kaca mata Jepang selaku negara yang mengajak dan menginisiasi IJEPA.

3. Thesis oleh Agus Haryanto pada tahun 2009, mengenai “*Kepentingan Ekonomi dan Politik Jepang dan Indonesia dalam Indonesia Japan Economic Partnership Agreement*” yang diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan program Pascasarjana S-2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Bogor.

Penelitian yang dilakukan Agus Haryanto secara khusus menekankan penggunaan sudut pandang Ekonomi Politik sebagai alat analisa terhadap IJEPA. Penelitian melihat bagaimana kepentingan yang ingin dicapai oleh Jepang ketika memutuskan untuk mengajak Indonesia bekerjasama dengan membentuk IJEPA dan bagaimana kepentingan tersebut terakomodasi di dalam IJEPA. Dengan kata lain, penelitian milik Agus Haryanto melihat bahwa ketika menginisiasi IJEPA, Jepang memiliki kepentingan ekonomi politik dibaliknya. Hal tersebut berbeda dengan penelitian peneliti saat ini yang melihat implementasi IJEPA hingga tahun 2017. Dimana nilai perdagangan diantara keduanya justru lebih tinggi dimiliki oleh Indonesia dibandingkan Jepang. Selain itu, penelitian peneliti saat berbeda karena lebih menekankan konsep *National Interest* melalui sudut pandang realisme.

4. Skripsi oleh Brian Nova Prathama pada tahun 2014 mengenai “*Implementasi Indonesia-Japan Economic Partnership (IJEPA) dalam capacity building melalui MIDEC : Tinjauan Ekonomi Politik*” yang diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan program sarjana S-1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Skripsi oleh Brian Nova secara garis besar membahas mengenai implementasi *Manufacturing Industrial Development Center* MIDEC IJEPA dan hambatan-hambatan yang menghalangi

implementasinya, berujung pada kerugian untuk Indonesia pada tahun 2013. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa MIDEC adalah sebuah hasil dari *issue linkage* yang sukses dilakukan Jepang sebagai *Linker* dan Indonesia sebagai *Linkee*. Jepang menyematkan kepentingan MIDEC untuk keuntungan negaranya sendiri. Jepang tidak ingin Indonesia menjadi negara yang mampu memproduksi manufaktur dengan baik, dan memungkinkan untuk menjadi pesaing Jepang di kawasan Asia. Jika Indonesia mampu memproduksi manufaktur dengan baik maka Jepang bisa dipastikan akan kehilangan pasar pemasok bahan mentahnya di kawasan Asia Tenggara, belum lagi posisi Indonesia merupakan negara pemasok bahan mentah yang terkenal murah.

Kesamaan penelitian oleh Brian Nova dengan peniliti sama-sama melihat bahwa IJEPA melalui salah satu kebijakannya berupa MIDEC hanya menguntungkan pihak Jepang selaku inisiator IJEPA. Penelitian yang diangkat Brian Nova berfokus pada penggunaan diplomasi ekonomi, sedangkan peneliti lebih berfokus pada penggunaan konsep *national interest* melalui perspektif realis dan *rational choice*, dengan melihat aspek nilai perdagangan yang pada dasarnya lebih menguntungkan pihak Jepang karena tersuplainya kebutuhan Jepang sejalan dengan kepentingan yang diakomodirnya melalui IJEPA, disamping aspek-aspek lain yang diimplementasikan didalam perjanjian IJEPA.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, dalam penelitian ini peneliti berusaha menyajikan penelitian dengan menekankan perspektif realis dalam melihat kepentingan negara Jepang yang diwujudkan melalui kerjasama bilateral yang berbasis ekonomi yakni *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* 2008-2017 dengan tujuan mempertahankan eksistensinya ditengah kompetisi global yang semakin dinamis melalui berbagai agenda IJEPA yang notabene menguntungkan Jepang dalam berbagai hal, seperti terpenuhinya kebutuhan energi Jepang untuk kegiatan produksi, dominasi Jepang dalam perdagangan transportasi dan otomotif dikawasan Asia terutama Indonesia. Dengan alasan tersebut, peneliti meyakini bahwa penelitian ini memberikan cara pandang baru yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang juga terkait dengan *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA).

F. Definisi Konseptual

Mengacu pada judul penelitian yakni “Kepentingan Jepang terhadap Indonesia di bawah Kerangka Kerjasama Bilateral *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement 2008-2017*”, terdapat setidaknya dua konsep yang akan didefinisikan secara konseptual oleh peneliti karena pemahaman mengenai kedua hal tersebut dirasa tidak begitu familiar dan umum dipahami. Definisi konseptual sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian guna mendefinisikan suatu konsep dengan menggunakan konstruk yang berbeda. Dengan kata lain, peran dari definisi konseptual

dalam suatu penelitian adalah memberikan makna pada suatu konsep atau suatu istilah tertentu yang tidak umum dipahami oleh masyarakat maknanya. Adapun dua konsep tersebut diantaranya (1)Kerjasama bilateral dan (2)*Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA).

1. Kerjasama Bilateral

Kerjasama bilateral merupakan bagian dari kerjasama ekonomi Internasional yang mencakup dua negara saja. Definisi kerjasama bilateral dilihat dari jumlah anggotanya. Kata “bi” dalam kata bilateral bermakna dua, artinya kerjasama ini hanya dilakukan oleh dua negara terkait yang sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama. Kerja sama ini biasanya diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik perdagangan, diplomatik, kebudayaan dan juga pendidikan.¹⁸

Hubungan bilateral biasanya menggambarkan adanya hubungan timbal balik, atau dengan kata lain hubungan yang saling mempengaruhi antara dua pihak. Menurut Perwita dan Yani, terdapat beberapa rangkaian pola dalam pola hubungan bilateral yang meliputi aksi reaksi negara terkait diantaranya sebagai berikut¹⁹ :

¹⁸Ahmad Rustandi SH dan Zul Afidi Ardian SH. 1988. Tata Negara Jilid 2, hal.202

¹⁹Perwita A.A & Y. M., Yani.,(2005).“*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- a. Rangsangan atau kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai.
 - b. Presepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima.
 - c. Respon atau aksi timbal balik dari negara penerima.
 - d. Presepsi atau respon oleh pembuat keputusan dari negara pemprakarsa.

2. *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*

IJEPA adalah bentuk perjanjian kerjasama Ekonomi bilateral antara Indonesia dan Jepang yang ditandatangani dan dibentuk pada tanggal 20 Agustus 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Shinzo Abe.²⁰ IJEPA mulai aktif diimplementasikan pada 1 Juli 2008. IJEPA merupakan salah satu perwujudan EPA yang sejak awal diinisiasi oleh Jepang. Kesepakatan ini merupakan perjanjian perdagangan bebas bilateral pertama yang dilakukan Indonesia, dan yang paling komprehensif. IJ-EPA adalah sebuah *Free Trade Agreement New-Age* (FTA babak baru) yang terdiri dari 13 isu komprehensif dan bersifat WTO plus (World Trade Organization plus) karena kesepakatan yang dibuat melebihi kesepakatan-kesepakatan yang sudah diatur di dalam WTO, ditambah adanya peningkatan kapasitas (*Capacity*

²⁰Nn. Hubungan perekonomian Indonesia-Jepang.[Internet].http://www.id.emb-japan.go.jp/birelEco_id.html diakses pada 20 Maret 2017

²¹ Building) sebagai bagian dari Partnership Agreement (kemitraan).

Kesepakatan di dalam IJEPA memuat beberapa inti dasar diantaranya²²

1. Memfasilitasi, mempromosikan, dan meliberalisasikan perdagangan barang dan jasa antara Jepang dengan Indonesia.
 2. Meningkatkan kesempatan investasi dan mempromosikan aktivitas investasi melalui penguatan perlindungan untuk investasi dan aktivitasnya antara Jepang – Indonesia
 3. Menjamin proteksi hak – hak intelektual dan mempromosikan kerjasama di bidang – bidang yang sudah disepakati
 4. Meningkatkan transparansi rezim pemerintahan kedua negara dan mempromosikan kerjasama yang saling menguntungkan antara Jepang – Indonesia
 5. Mempromosikan kompetisi
 6. Mengembangkan lingkungan bisnis diantara kedua belah pihak

²¹MOF Japan. *Japan's Economic Partnership Agreement*. 2008. [Internet] http://www.customs.go.jp/english/epa/files/japans_epa.pdf diakses pada 5 Juni 2018

²²Derliana. 2011. Implementasi Indonesia Japan Economic Partnership Agreement Pada Ekspor Komoditas Udang Dan Tuna Dalam Sektor Perikanan Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia, Bandung.

7. Membuat sebuah kerangka kerja untuk meningkatkan kerjasama yang lebih erat didalam bidang – bidang yang telah disepakati
 8. Menciptakan prosedur yang efektif untuk implementasi dan aplikasi kesepakatan ini untuk resolusi-resolusi dari pertikaian yang mungkin muncul dikemudian hari

Secara umum, pemahaman mengenai IJEPA sendiri tiga dapat dipisahkan keterkaitannya dengan tiga pilar utama yang menjadi identitas IJEPA, diantaranya²³:

1. Fasilitasi Perdagangan dan investasi, yakni upaya bersama untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan tingkat kepercayaan bagi investor Jepang
 2. Liberisasi: dihapuskannya hambatan perdagangan dan investasi (bea masuk, memberi kepastian hukum)
 3. Kerjasama: kesepakatan untuk kerjasama dalam meningkatkan kapasitas Indonesia sehingga lebih mampu bersaing dan memanfaatkan peluang pasar dari EPA secara optimal.

G. Argumentasi Utama

Pada penelitian yang berfokus pada “Kepentingan Jepang Terhadap Indonesia di bawah Kerangka Kerjasama Bilateral *Indonesia*

²³Fitri T.B &Fithra Faisal Hastiadib. Analisis Dampak *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* terhadap *Price-Cost Margins* Industri Manufaktur Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. 15 No. 2 Januari 2015: 192-209

Japan Economic Partnership Agreement 2008-2017” peneliti memiliki fokus penelitian atau argumentasi utama sebagai berikut:

“Jepang mengakomodir kepentingannya melalui IJEPA, dan berhasil memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan Indonesia dilihat dari implementasi IJEPA pada tahun 2008-2017.”

Argumentasi utama berdasarkan beberapa fakta antara lain :

1. IJEPA merupakan salah satu bentuk kerjasama bilateral yang diinisiasi Jepang bersama Indonesia yang digadang untuk menunjang pertumbuhan ekonomi baik Jepang maupun Indonesia, namun implementasi perjanjian pada dasarnya lebih menguntungkan Jepang.
 2. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa jumlah pertumbuhan ekspor Indonesia ke Jepang lebih tinggi dibandingkan jumlah ekspor Jepang ke Indonesia dari tahun diimplementasikannya IJEPA hingga tahun 2017. Sebelum adanya IJEPA, jumlah ekspor dan impor juga menunjukkan kondisi yang sama, dimana ekspor Indonesia lebih tinggi dibandingkan ekspor Jepang ke Indonesia. Peneliti melihat situasi ini menguntungkan Jepang.
 3. Indonesia merupakan negara dengan potensi sumber daya alam yang menjanjikan dan melimpah.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam suatu penelitian sangat dibutuhkan.

Fungsi dari sistematika pembahasan adalah menjadikan penelitian lebih terarah dan terstruktur sehingga peneliti memiliki gambaran yang jelas dalam melakukan dan menyusun penelitian, oleh karena itu pada penelitian ini peneliti membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab utama diantaranya :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan berbagai gambaran awal mengenai apa itu *Indonesia Japan Economic Agreement* (IJEPA) sebagai beserta dinamika dan signifikansi penelitian agar tetap menarik untuk diteliti. Pada bab ini peneliti akan memaparkan beberapa sub bab diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, beserta argumentasi utama.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini peneliti akan berfokus pada landasan teoritik maupun konsep yang menunjang penelitian untuk bisa mencari jawaban atas berbagai permasalahan yang sudah dirumuskan pada rumusan masalah sebelumnya.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menyajikan bentuk metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pada metode penelitian, peneliti membagi pendalaman pembahasan dengan cara membaginya menjadi beberapa sub bab utama diantaranya pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, tingkat analisa, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta alur atau logika penelitian.

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini peneliti akan melakukan penyajian data berdasarkan keseluruhan data yang telah diperoleh. Data yang disajikan berupa data yang didapat melalui proses kajian pustaka dalam bab ini akan dianalisa sebagai jawaban atas rumusan permasalahan yang sebelumnya telah dibuat.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan beserta dengan saran yang bertujuan untuk membangun penelitian agar penelitian bisa diterima dengan baik dan bermanfaat untuk kedepannya.

BAB II

KONSEP NATIONAL INTEREST DAN RATIONAL CHOICE

A. National Interest

Esensi hubungan Internasional pada dasarnya memuat tiga konsepsi interaksi diantaranya; *power, actors dan interest*. Dalam hal ini negara berperan sebagai aktor, seorang aktor memiliki kemampuan berinteraksi yang bertujuan untuk mencapai kepentingan negaranya. Salah satu proses interaksi yang dilakukan oleh negara dilaksanakan melalui kebijakan luar negeri. Kepentingan yang ingin dicapai beragam jenisnya, seperti halnya kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan untuk mendapatkan power dan kepentingan-kepentingan lainnya. Adanya perbedaan kepentingan antara negara satu dengan negara yang lain biasanya didasarkan pada perbedaan sistem yang ada.

Suatu kepentingan nasional yang dibuat biasanya mengacu pada dua faktor yakni kondisi eksternal negara dan kondisi internal negara. Kondisi eksternal negara dalam hal ini terkait dengan isu-isu yang sedang berlangsung seperti halnya isu ekonomi, isu politik, isu budaya sebagai tanggapan terhadap isu tersebut yang mungkin berpotensi mempengaruhi kondisi kestabilan negara. Disisi lain ada pula kondisi internal sebagai pertimbangan kepentingan nasional, kondisi internal tersebut terkait dengan kesejahteraan masyarakat (*public interest*).²⁴ Secara konseptual, kepentingan nasional dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara, seperti halnya situasi ketika

²⁴W.D. Clinton, *The Two Face of National Interest*, Louisiana State University Press, AmerikaSerikat, 1994.

Indonesia yang memberikan bantuan mereka kepada Nelson Mandela berkaitan dengan kepentingan nasional mereka di forum PBB dan masalah timor-timor.²⁵

Beberapa tokoh terkenal dalam ilmu hubungan Internasional yang turut mendefinisikan konsep *national interest* diantaranya adalah Scott Burchill, Hans J. Morgenthau dan Clinton. Scott Burchill merupakan salah satu tokoh yang turut memberikan pandangannya terhadap konsep *national interest*. Meskipun pemikiran Burchill di dominasi oleh cara pandang realis, namun Burchill juga mencoba mengemukakan pandangannya mengenai *national interest* dari berbagai perspektif, dimana satu dengan yang lainnya memiliki implikasi yang berbeda dalam memahami apa makna dari *national interest* itu sendiri. Adapun perspektif yang dikemukakan Burchill diantaranya; realisme, marxisme, liberalisme, kontruksivisme dan *english school*.²⁶

Perspektif realis mendefinisikan *national interest* dengan cara pandang “anarkis”, dimana negara dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya didasarkan pada alasan rasa was-was diserang, selalu dihantui oleh kecurigaan dan oleh karenanya negara bersifat anarkis dalam politik Internasional.²⁷ Pandangan ini melihat bahwa kepentingan nasional didasarkan pada kepentingan negara karena negara merupakan supremasi politik tertinggi dimasyarakat dan “anarkisme” dalam politik internasional hanya bisa ditanggulangi melalui negara. Oleh karena negara adalah satu-satunya aktor, keputusan luar negeri hanya mengakui “negara”

²⁵Sitopeu P. Antonius. 2011. Studi Hubungan Internasional. Graha Ilmu: Yogjakarta hal.164

²⁶*Ibid.*, 6-7

²⁷Scoot Burchill. 2005. *The National Interest in International Relations Theory*; Palgrave hal.33

sebagai satu-satunya entitas.²⁸ Oleh sebab itu, “kepentingan nasional” tak lain adalah “kepentingan negara” yang dilandaskan oleh kekuasaan yang mereka miliki.²⁹ Kepentingan nasional menurut realis dikendalikan oleh beberapa hal seperti tekanan dalam kompetisi dan didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang serius.

Pendapat mengenai *national interest* yang dikemukakan oleh Burchill tersebut didukung oleh pandangan tokoh realis yang tak lain adalah Hans J. Morgenthau. Menurutnya, perilaku negara dalam Hubungan Internasional adalah untuk menjaga agar elemen-elemen “kekuatan” yang dimiliki negara tetap dapat menjamin kedaulatannya diantara negara lain dan sebagai konsekuensinya, menjaga konstelasi kekuatan politik di tingkat Internasional tetap seimbang.³⁰ Morgenthau juga mengakui adanya praktik diplomasi sebagai salah satu sarana mewujudkan kepentingan nasional. Pemikiran Morgenthau juga didasarkan pada logika bahwa kebijakan luar negeri harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan moral, legal dan ideologi yang dianggap berbahaya karena pada kesimpulannya kepentingan nasional bagi Morgenthau adalah mengejar dan memperoleh kekuasaan dengan melalui cara-cara yang bersifat memaksa maupun teknik kerjasama, apapun yang dapat membantu membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain sebagai perwujudan

²⁸Scoot Burchill dalam Charles R. Beitz, *Political Theory and International Relations*, New Jersey: Princeton University Press, 1968. hal.31

²⁹*Ibid.*, hal. 39

³⁰Op,cit. hal.39

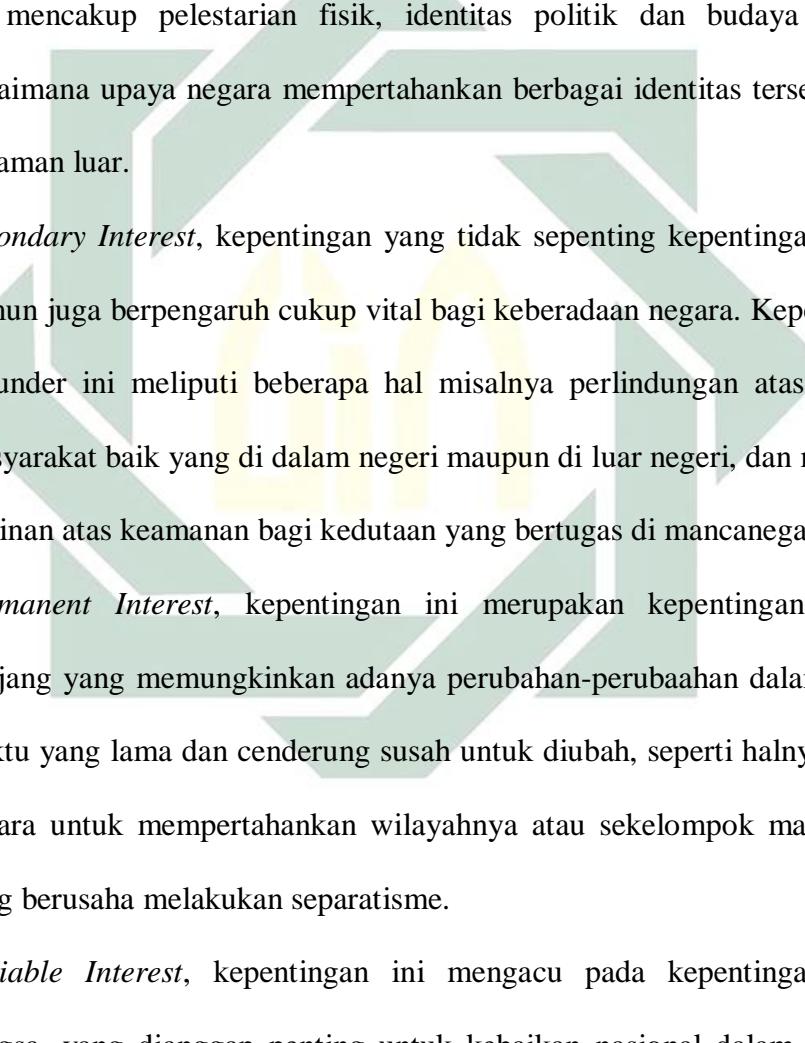
kekuasaan itu sendiri.³¹ Dengan kata lain, kepentingan didefinisikan dan perjuangkan melalui kekuasaan atau *power*. Dalam memahami politik luar negeri, yang harus dipahami bukanlah motif negarawan yang mempraktikkan politik luar negeri, melainkan harus memahami bagaimana kemampuan negarawan tersebut dalam memahami permasalahan-permasalahan politik luar negeri yang dihadapi, agar tindakan yang diambil dapat menentukan berhasil tidaknya politik luar negeri tersebut, dalam hal ini pola pikir rasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan.

Kepentingan nasional setiap negara masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Keinginan untuk memperoleh kekuasaan juga dipahami melalui sudut pandang kekuatan ekonomi suatu negara terhadap negara lain dengan cara dominasi, atau bisa jadi juga untuk mempertahankan eksistensi ditengah kompetisi ekonomi global yang semakin dinamis. Tidak jarang untuk meraih kepentingannya, suatu negara mewujudkannya melalui kerjasama ekonomi baik bilateral maupun multilateral, hal tersebut sejalan dengan pendapat Morgenthau mengenai mengejar dan memperoleh kekuasaan dengan melalui cara-cara yang bersifat memaksa maupun teknik kerjasama, apapun yang dapat membantu membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain sebagai perwujudan kekuasaan itu sendiri.³²

³¹Sitepu P. Antonius. 2011. Studi Hubungan Internasional. Graha Ilmu: Yogyakarta hal.164

³²*Ibid.*, hal.164

Thomas W. Robinson, salah satu tokoh yang mencoba mendefinisikan *National Interest* dengan cara mengklasifikasikannya menjadi enam kategori diantaranya³³:

- 
 1. *Primary Interest*, kepentingan ini merupakan kepentingan yang bersifat prioritas dan harus diperjuangkan bagaimanapun situasinya. Kepentingan ini mencakup pelestarian fisik, identitas politik dan budaya negara, bagaimana upaya negara mempertahankan berbagai identitas tersebut dari ancaman luar.
 2. *Secondary Interest*, kepentingan yang tidak sepenting kepentingan utama namun juga berpengaruh cukup vital bagi keberadaan negara. Kepentingan sekunder ini meliputi beberapa hal misalnya perlindungan atas seluruh masyarakat baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, dan memberi jaminan atas keamanan bagi kedutaan yang bertugas di mancanegara.
 3. *Permanent Interest*, kepentingan ini merupakan kepentingan jangka panjang yang memungkinkan adanya perubahan-perubaahan dalam kurun waktu yang lama dan cenderung susah untuk diubah, seperti halnya upaya negara untuk mempertahankan wilayahnya atau sekelompok masyarakat yang berusaha melakukan separatisme.
 4. *Variable Interest*, kepentingan ini mengacu pada kepentingan suatu bangsa, yang dianggap penting untuk kebaikan nasional dalam keadaan tertentu. Dengan kata lain penting tidaknya bergantung pada suatu kondisi tertentu.

³³Thomas W. Robinson. 1967. *A national Interest Analysis of Sino-Soviet Relations*. Vol.11, no.2, Published by Wiley on behalf of The International Studies Association hal.87

5. *General Interest*, kepentingan ini meliputi kepentingan ekonomi, kesehatan, keamanan dan lain sebagainya, sejalan dengan sebutannya yakni *general interest*, maka kepentingan biasanya juga secara umum sama dibutuhkannya oleh negara-negara lain.
 6. *Specific Interest*, kepentingan khusus ini biasanya hanya mewakili satu permasalahan tertentu di lokasi dan waktu yang tertentu pula.³⁴

B. Rational Choice

Rational choice atau pilihan rasional pada dasarnya menjelaskan bahwa manusia akan mempertimbangkan segala sesuatu yang dapat menguntungkan dirinya dalam pengambilan setiap keputusan. Konsep *rational choice* merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari substansi kepentingan nasional, dimana peran seorang petinggi untuk merumuskan kepentingan nasionalnya tidak terlepas dari berbagai pertimbangan untung dan rugi dengan cara berfikir yang rasional. *Rational choice* pada mulanya bersumber dari metodologi ekonomi mengenai pertimbangan akan untung rugi dengan tokohnya yang bernama James Buchanan, pemenang Nobel ilmu ekonomi, kemudian masuk dan diadopsi oleh beberapa wilayah keilmuan dan muncul sebagai perspektif yang dominan dalam ilmu politik.³⁵

Menurut J. Elster, intisari dari pilihan rasional adalah ketika individu dihadapkan pada beberapa jenis pilihan, individu tersebut akan memilih

³⁴Urmila Sharma dan Sharma, S.K dalam Michael Invader. 2000. *Principles and Theories in Political Science*. New Delhi: Atlantic Publishers and Distributors, Hal.147

³⁵Prof. DR. I.B Wirawan. Teori-teori sosial dalam tiga paradigma. Jakarta:Kencana Perdana Media, hal.190

diantaranya yang diyakini baik dan akan mendatangkan keuntungan.³⁶ Tokoh lain yang menjelaskan *rational choice* datang dari tokoh bidang ilmu sosiologi yakni James S. Coleman. Coleman berpendapat bahwa untuk melihat problem makro, hal pertama yang dilakukan terlebih dulu adalah mengkaji problem mikro, dikarenakan problem mikro merupakan salah satu kajian yang pada akhirnya membawa individu pada problem makro.³⁷ *Rational choice* menggambarkan pola dimana orang-orang cenderung bertindak secara sengaja ke arah suatu tujuan, dimana tujuan tersebut dibentuk oleh pilihan-pilihan maupun nilai-nilai.³⁸

Terdapat dua unsur utama dalam *rational choice* yakni sumber daya dan aktor. Para aktor akan melakukan berbagai macam tindakan yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan manfaat serta segala sesuatu yang berkonstribusi pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka.³⁹ Walaupun pada awalnya pilihan rasional mengacu pada tujuan yang dimaksud individu, setidaknya ada faktor yang memaksa tindakan yang mempengaruhi individu tersebut, diantaranya⁴⁰:

1. Keterbatasan sumber daya, dalam hal ini aktor satu dan lainnya memiliki sumber daya yang berbeda maupun akses yang berbeda ke sumber daya lain, jika semakin banyak sumber daya yang dimiliki maka akan semakin banyak kesempatan untuk individu mencapai tujuannya.
 2. Lembaga sosial, faktor kedua ini bisa berperan sebagai penghambat terhadap pencapaian suatu tujuan dikarenakan lembaga akan mengawasi

³⁶Jon Elster. 1996. *Rationally and the Emotions*, The Economic Journal, 106(438)

³⁷James S. Coleman. 1994. *Foundations of Social Theory*; Belnap Press, hal 11

³⁸*Ibid.*, hal.13

³⁹George Ritzer. 2012. Teori Sosiologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁴⁰Prof. DR. I.B Wirawan. Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma. Jakarta:Kencana Perdana Media, hal.221

setiap tindakan yang dilakukan aktor seperti memberikan sanksi dan sebagainya yang bisa menghambat atau bahkan menunjang tercapainya suatu tujuan.

Pendapat lainnya dalam mendeskripsikan *rational choice* datang dari Weber, menurutnya melakukan pilihan rasional merupakan bagian dari tindakan sosial. Tindakan rasional merupakan suatu tindakan yang dilakukan diatas kesadaran atas berbagai macam pertimbangan. Weber membagi tindakan sosial menjadi 4 jenis, diantaranya⁴¹:

1. Rasionalitas instrumental

Pada tingkatan ini, tindakan rasional berorientasi pada segala macam pertimbangan dan pilihan yang menentukan sebuah tujuan dari tindakan dan alat yang digunakan untuk mencapainya. Dalam melakukan tindakan, individu sadar dan melalui proses penuh pertimbangan sebelumnya, dengan kata lain tindakan dilakukan dengan cara berfikir matang.

2. Rasionalitas yang berorientasi nilai

Pada tingkatan ini, individu cenderung melihat alat-alat yang digunakan sebagai sebuah objek pertimbangan dan perhitungan yang sadar. Dengan kata lain, suatu tindakan dilakukan karena mendahulukan nilai-nilai sosial serta kepentingan agama yang individu miliki.

⁴¹Doyle P. Jhonson. 1998. Teori Sosial Moderen dan Klasik. PT.Gramedia Pustaka, Jakarta. hal. 220

3. Tindakan Tradisional

Tindakan ini merupakan refleksi perilaku seseorang yang disebabkan oleh kebiasaan-kebiasaan terdahulu, tanpa perencanaan dan pertimbangan.

4. Tindakan Afektif

Tindakan ini didasari oleh emosional atau perasaan, tindakan yang diambil didominasi oleh perasaan tanpa dasar pertimbangan yang matang, cenderung tidak rasional dan spontan karena hal tersebut sebagai sebuah bentuk perwujudan ekspresi emosional individu.

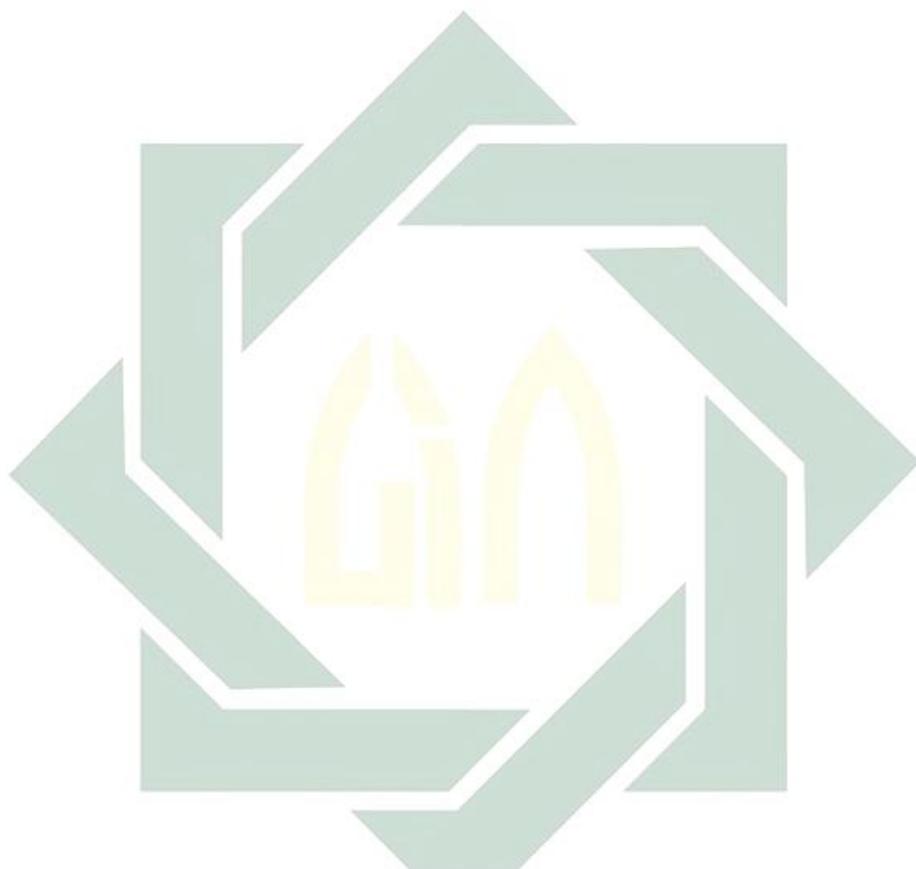
Pendekatan pemecahan masalah yang rasional merujuk pada sesuatu yang ideal, yakni bagaimanakah membuat atau menciptakan suatu kebijakan luar negeri yang baik atau sesuatu yang ideal.⁴² Pemaknaan ideal ini sebagai kemungkinan yang dapat diterapkan kedalam beberapa situasi dan kondisi, maka dengan demikian dapat disimpulkan jika dasar tindakan politik internasional kontemporer terletak pada pola permasalahan yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan luar negeri yang rasional.⁴³

Konsep *national interest* dan *rational choice* dirasa sangat mewakili penelitian peneliti untuk merumuskan kebijakan luar negerinya berupa IJEPA, Jepang telah mempertimbangkan segala kemungkinan untung rugi yang mungkin didapatkan setelah IJEPA diimplementasikan untuk meraih kepentingannya secara maksimal. Peneliti menekankan penggunaan konsep dikarenakan konsep lebih relevan dalam menjawab penelitian berjenis eksploratif, dibandingkan

⁴²Sitepu P. Antonius. 2011. Studi Hubungan Internasional. Graha Ilmu: Yogjakarta hal.72

⁴³*Ibid.*, hal.73

penggunaan teori yang fungsinya adalah sebagai pisau analisa dan lebih merepresentasikan penelitian yang berjenis eksplanatif. Oleh karena itu, penggunaan konsep dirasa tepat dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi yang berada pada objek alamiah, dimana peneliti berdiri sebagai instrumen kunci, dengan kata lain pada penelitian kualitatif peneliti berperan sebagai *human instrument*, adapun fungsinya yakni menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.⁴⁴

Penelitian kualitatif ini berfungsi menetapkan fokus penelitian, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsikan data dan terakhir adalah membuat kesimpulan atas temuannya.⁴⁵ Penelitian kualitatif sering juga disebut dengan penelitian *naturalistik* karena penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah, atau bisa juga disebut dengan *ethnography*, karena pada mulanya metode penelitian kualitatif ini seringkali digunakan untuk penelitian yang mengarah pada bidang antropologi budaya.

Mengacu pada rumusan masalah yang menekankan pada pertanyaan mengenai “apa” kepentingan Jepang terhadap Indonesia melalui kerangka kerjasama bilateral IJEPA, maka penelitian eksploratif merupakan alat yang

⁴⁴Sugiyono. 2010. Memahami penelitian kualitatif. Bandung. ALFABETA, hal.1

⁴⁵*Ibid*, hal.2

akan digunakan peneliti dalam menjawab penelitian ini. Penelitian eksploratif merupakan salah satu bentuk penelitian yang digunakan untuk meneliti sesuatu yang menarik perhatian yang belum diketahui maupun dipahami dengan baik. Dapat pula dikatakan bahwa penelitian eksploratif bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang suatu gejala dalam rangka merumuskan masalah secara terperinci.⁴⁶ Penelitian eksploratif dikenal pula dengan penelitian “eksploratori” dengan tata cara penelitian yang lebih luwes, dapat diubah-ubah sesuai situasi atau langkah-langkahnya yang tidak terstruktur baku seperti penelitian deskriptif.⁴⁷

Pemilihan jenis penelitian eksploratif dianggap tepat digunakan dalam penelitian ini dikarenakan sangat mewakili tahap-tahap dan karakteristik penelitian, seperti halnya diawali dengan menegemukakan fenomena yang menarik dalam penelitian, memunculkan pertanyaan penelitian dengan menekankan bentuk kata tanya “apa”, kemudian melalui proses penelaahan berbagai literatur (kajian pustaka) terhadap studi terdahulu sebagai bagian dari proses deduktifikasi untuk memperoleh gambaran umum mengenai sesuatu (objek penelitian) yang pernah dilakukan orang atau hampir sama dengan yang peneliti maksud, tujuannya adalah untuk mempertegas istilah yang akan digunakan kelak atau yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Kemudian menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan, hingga memasuki

⁴⁶Yanuar Ikbar. 2014. Metodologi dan Teori Hubungan Internasional. PT.Refika Aditama, Bandung. hal.13

⁴⁷ *Ibid*, hal.13

tahap terakhir yakni menganalisis data yang diperoleh kemudian menarik kesimpulan penelitian.⁴⁸

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data bersumber dari berbagai tempat diantaranya :

- a. Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya
 - b. Perpustakaan daerah wilayah Surabaya
 - c. Perpustakaan Bank Indonesia
 - d. Bersumber dari data yang dapat diakses secara online

Dalam penelitian ini, lamanya waktu yang dibutuhkan bagi peneliti dalam mencari data yang berasal dari buku, thesis, jurnal, laporan penelitian, dokumen, situs pemerintah, media cetak, dan internet serta wawancara jika dibutuhkan dimulai sejak bulan maret. Adapun perincian secara lebih lengkapnya mengenai waktu penelitian, tertuang dalam penjabaran tabel berikut ini ;

Tabel 3.1 Rencana Kegiatan Penelitian

Kegiatan	2018-2019						
	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Desember	
Pengajuan Judul	✓						

⁴⁸Yanuar Ikbar. 2014. Metodologi dan Teori Hubungan Internasional. PT.Refika Aditama, Bandung. hal.14

Bimbingan	✓						
Seminar Proposal		✓					
Bimbingan dan proses penelitian		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sidang Skripsi							✓

C. Subjek Penelitian

Yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah orang yang akan dimintai keterangan. Subjek penelitian dalam ilmu hubungan Internasional juga sering disebut dengan unit analisa.⁴⁹ Unit analisa sendiri terbagi menjadi beberapa unit lagi diantaranya, Individu & kelompok, Negara Bangsa, dan Sistem Regional & Global.⁵⁰

Dalam penelitian ini subjek penelitian terletak pada negara, karena membahas kepentingan satu negara terhadap negara lainnya, berupa pembentukan kerjasama ekonomi bilateral oleh Jepang terhadap Indonesia yang dinamakan dengan *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA).

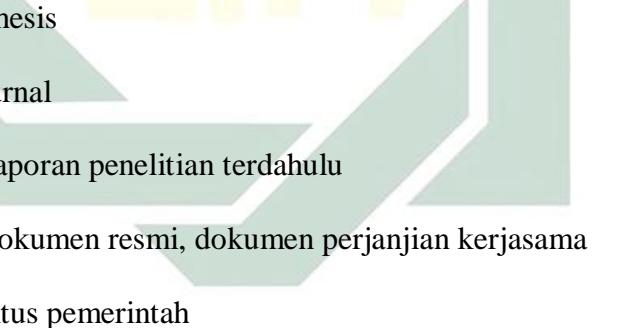
⁴⁹Mohtar Mas'oed. 1994. Ilmu Hubungan Internasional. Disiplin dan Metodologi. Jakarta: Pustaka LP3ES, hal.35

⁵⁰*Ibid.* hal.39

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan merujuk pada penggunaan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Dengan kata lain, data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut data disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Karena tidak didukung penggunaan data primer, maka dalam penelitian ini data sekunder merupakan satu-satunya penunjang penelitian. Data sekunder juga sering disebut dengan *library research*.

Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan peneliti berasal dari :

- 
 1. Berbagai jenis buku yang menunjang pengumpulan data
 2. Thesis
 3. Jurnal
 4. Laporan penelitian terdahulu
 5. Dokumen resmi, dokumen perjanjian kerjasama
 6. Situs pemerintah
 7. Media cetak maupun online

Adapun dalam penelitian ini, data yang akan dikumpulkan berkaitan dengan sejarah hubungan diplomatik Jepang dan Indonesia sejak jaman kolonialisme hingga saat ini, posisi negara Indonesia yang menguntungkan bagi negara Jepang dan potensi yang dimilikinya, aspek

yang sudah diimplementasikan dalam IJEPA, serta data lain yang berhubungan dengan topik penelitian.

E. Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memusatkan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵¹

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung melalui dua tahap yakni pada saat pengumpulan data berlangsung dan saat pengumpulan data telah selesai. Menurut Miles dan Huberman (1984) aktivitas selama analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data yang diperoleh berada pada titik jenuh.⁵²

Dalam penelitian ini, peneliti akan menerapkan teknik analisis data yang diambil dari pemahaman Miles dan Huberman dengan melewati beberapa tahapan analisis data diantaranya:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Tahap reduksi data merupakan tahapan pertama, dimana peneliti akan berupaya mengumpulkan data semaksimal mungkin melalui kajian pustaka dan proses wawancara, sehingga memungkinkan data yang didapat akan sangat banyak

⁵¹Lexy J. Moleong. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal.248

⁵²Sugiono. 2010. Memahami penelitian kualitatif. Bandung. ALFABETA

dan tidak teratur. Langkah selanjutnya, peneliti akan melakukan pemilihan, pemasukan fokus, penyederhanaan, dan mentransformasikan data kasar yang telah dikumpulkan sebelumnya.⁵³

2. Penyajian data (*data display*)

Tahapan kedua setelah reduksi data dilakukan adalah tahap data disajikan. Penyajian data dalam penelitian ini ditampilkan dengan cara penjabaran secara naratif, bagan, tabel, dan sejenisnya. Penyajian data dilakukan untuk menampilkan hasil reduksi data yang sebelumnya diorganisirkan dan ditampilkan dengan lebih tersusun bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami sebuah penelitian.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion*)

Tahap ketiga setelah data disajikan adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil dari temuan dan verifikasi data. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adanya temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Tahap penarikan kesimpulan ini juga merupakan pencapaian hasil terkait penelitian yang dilakukan.

⁵³Hamid Patilima. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

F. Alur Penelitian

Dalam suatu penelitian, peneliti membutuhkan alur penelitian yang jelas agar memudahkan peneliti itu sendiri dalam melakukan penelitian. Adapun alur penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rancangan penelitian

Tahapan ini berasal dari adanya ketertarikan peneliti terhadap suatu permasalahan mengenai suatu bentuk kerjasama bilateral yang diwujudkan melalui *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA). Peneliti tertarik melihat permasalahan IJEPA melalui sudut pandang yang berbeda dari peneliti lain yang sebelumnya telah mengangkat topik penelitian yang sama. Kevariatifan topik terakit memuat peneliti tertantang untuk menyorotinya dari fokus yang berbeda sehingga diharapkan ditemukannya hasil dan penemuan baru melalui tahap ditariknya kesimpulan penelitian.

b. Tahap pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti mulai melakukan pencarian referensi terkait pembahasan yang akan diangkat. Referensi tersebut berupa buku, jurnal, skripsi terdahulu, berita online, situs pemerintah, dan berbagai artikel terkait yang dimuat di internet. Untuk menunjang kebutuhan buku sebagai referensi peneliti telah mengunjungi

perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya dan juga perpustakaan daerah wilayah Surabaya.

c. Tahap analisis data

Pada tahap ini peneliti melakukan analisa pada data yang sudah ditemukan sebelumnya. Kemudian peneliti melakukan proses analisa dengan menggunakan teori atau konsep yang dipakai dalam penelitian dan menarik inti data serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya.

d. Tahap penulisan laporan

Terdapat dua bentuk penulisan laporan yakni laporan pramenelitian berupa proposal skripsi dan laporan skripsi. Proposal skripsi berisi tentang rencana penelitian yang akan dilakukan. Setelah proposal skripsi selesai maka tahap selanjutnya adalah penulisan skripsi yang berisi keseluruhan penelitian. Penulisan laporan skripsi yang berisi tentang inti dan keseluruhan penelitian tersebut.

Penulisan laporan skripsi merupakan kelanjutan dari proposal penelitian, dimulai dengan melakukan proses analisa data yang didapat dari penelitian lapangan dengan menggunakan teori atau konsep yang telah ditentukan sebelumnya dan dikemukakan secara deskriptif, terstruktur serta jelas. Pada tahap akhir proses penulisan laporan skripsi adalah penarikan kesimpulan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Sejarah Hubungan Bilateral Indonesia dengan Jepang

Sebelum memasuki era penjajahan, Jepang dan Indonesia sudah memiliki hubungan akan tetapi dalam hal ini Jepang lebih dominan menjadi aktor yang berperan aktif dibandingkan Indonesia yang cenderung pasif. Awal mula hubungan Jepang dan Indonesia ini terjadi sejak akhir abad ke-19M. Awal mulanya, motif yang ingin diusung dari hubungan tersebut adalah motif ekonomi akan tetapi semakin lama motifnya bergeser pada kepentingan politik, ekspansi yang dipicu oleh adanya rasa percaya diri Jepang yang pada saat itu sedang mengalami kenaikan yang pesat, sehingga munculah rasa untuk semakin memperluas kekuatan dan kekuasaannya, periode tersebut terjadi pada akhir paruh pertama abad ke-20.⁵⁴

A.1. Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang Pra-Kemerdekaan

Ketika memasuki era feudal atau periode Sengoku, kemunculan Jepang ditandai dengan datangnya para pedagang dan misionaris Eropa pada tahun 1543 melalui kapal Portugis. Sebelum peralihan kepemimpinan diberikan kepada kaisar Meiji, penguasa Jepang pada tahun 1603 yakni

⁵⁴Rifki Z, 2013. Diplomasi ekonomi Jepang terhadap Indonesia melalui *Japan International Cooperation Agency*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Shogun Tokugawa menerapkan kebijakan berupa menutup diri (seclusion), sebagai upaya mempertahankan kekuasaanya.⁵⁵ Sehingga pada masa itu Jepang hanya melakukan kebijakan dagang bersama VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) yang tak lain adalah kongsi dagang dari negara Belanda yang berdiri pada 1602 dari perseroan dagang yang pada mulanya saling bersaing untuk memonopoli perdagangan Asia dan Hindia Timur.⁵⁶

Setelah peralihan kekuasaan kepada Meiji, sekitar tahun 1868-1912 Jepang mulai menunjukkan taringnya. Salah satu bukti bangkitnya Jepang dimata dunia ditandai dengan kemenangan Jepang atas Tiongkok dan Rusia.⁵⁷ Pandangan Kaisar Meiji yang membawa kemajuan bagi Jepang adalah pandangan terhadap kemajuan teknologi dan persenjataan yang dimiliki bangsa barat. Salah satu bukti keterbukan tersebut ditandai dengan ditanda tanganinya Perjanjian Kanagaw pada tahun 1854 antara Jepang dan Amerika Serikat, dalam hal ini Jepang merealisasikan awal kemoderenisasiannya dengan mulai membuka pelabuhan.⁵⁸ Dari situlah titik mula moderenisasi Jepang yang kemudian berimbas pada Indonesia hingga saat ini.

Hubungan Indonesia dan Jepang di daerah Hindia ditandai dengan datangnya imigran ilegal dan tidak terorganisasi yang disebut dengan

⁵⁵Kemlu.Sejarah Jepang. [Internet] <https://www.kemlu.go.id/tokyo/id/Pages/Jepang.aspx> diakses pada 17 Desember 2018

⁵⁶Rifki Z, 2013. Diplomasi ekonomi Jepang terhadap Indonesia melalui *Japan International Cooperation Agency*. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

⁵⁷*Op. cit.* diakses pada 17 Desember 2018

⁵⁸Kemlu. Sejarah Jepang. [Internet] <https://www.kemlu.go.id/tokyo/id/Pages/Jepang.aspx> diakses pada 17 Desember 2018

julukan *kimin* dari Jepang ke Indonesia.⁵⁹ Alasan masuknya *kimin* ke Indonesia ini dikarenakan sikap acuh Jepang terhadap rakyatnya karena pada masa tersebut pemerintah Jepang hanya berfokus terhadap kemajuan teknologi industri. Para *kimin* yang masuk ke Indonesia banyak didominasi oleh perempuan. Para *kimin* tersebut biasanya terlibat dalam aktifitas perdagangan, pertanian, perikanan bahkan aktifitas seperti usaha rumah-rumah bordil hingga pelacuran.⁶⁰

Kebijakan pada masa itu kemudian mengarah pada kebijakan ultrasionalis, hal ini didasari karena turut sertaanya kalangan militer ke dalam struktural birokrat pemerintahan. Salah satu perwujudan kebijakan tersebut dengan cara ekspansi ke selatan, ekspansi ini mulai dicanangkan Jepang untuk memperoleh minyak dari wilayah penghasil minyak sebagai bahan pendukung perang, sehingga pada tahun 1910 Indonesia tepatnya daerah Tarakan Borneo merupakan salah satu daerah yang tuju Jepang untuk impor minyak.⁶¹

Pada tahun 1930 hubungan Indonesia-Jepang semakin intensif terutama dalam bidang ekonomi dan industri. Keintensifan hubungan diantara keduanya ditandai dengan masuknya para pengusaha yang kemudian mendirikan cabang perusahaannya di Indonesia. Sejalan dengan

⁵⁹Shiraishi dan Takashi Shiraishi, "Orang Jepang di Asia Tenggara", Yayasan Obor, Jakarta, 1998.Hal 4.

⁶⁰Sri, Pangastoeti. Dari Kyuushuu ke Ran'in: *Karayuki-San dan Prostitusi Jepang di Indonesia (1885-1920)*”, Humaniora vol.21, Yogyakarta, 2009. Hal 139.

⁶¹Bagus S.R. Skripsi mengenai Politik Minyak Jepang dan Teori Ekspansi ke Selatan.Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Indonesia

semakin gencarnya ekspansi ke Selatan yang juga semakin populer ditahun 1930 tersebut. Kebanyakan pengusaha yang masuk ke Indonesia merupakan perusahaan otomotif dan transportasi. Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan baik dari pemerintah Jepang sendiri. Masa-masa tersebut merupakan masa-masa dimana pengusaha baik kecil maupun besar mulai berkembang dan perkembangan sendiri terjadi cukup pesat.

Hubungan yang awalnya baik mulai bergeser karena adanya keinginan Jepang menguasai Indonesia, potensi ladang minyak yang dimiliki Indonesia dan masa kolonialisme yang populer mengisiatif Jepang untuk merebut kekuasaan Indonesia oleh Belanda menjadi kekuasaan milik Jepang dengan tujuan menguasai dan mengeksplorasi segala kekayaan yang dimiliki Indonesia, baik sumber daya alam maupun manusia. Hal tersebut dimulai ketika Jepang menggertak dunia dengan melakukan penyerangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbour. Jepang merayap masuk dan menerobos wilayah kekuasaan blok Amerika Serikat salah satunya Indonesia melalui wilayah Tarakan pada Januari 1942.⁶² Setelah berhasil mengusir Belanda, Jepang mulai menduduki kekuasaan atas Indonesia pada saat itu. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, dengan begitu rakyat Indonesia akan meyakini bahwa Jepang berniat baik. Jepang dalam hal ini hanya ingin memanfaatkan Indonesia dan mengeksplorasi kekayaannya, disamping itu Jepang juga menginginkan simpati Indonesia agar mau mendukung Jepang dalam

⁶²Marwati Djoned Poesponegoro. 1984. Sejarah Nasional Indonesia. Balai Pustaka

perang pasifik. Namun pada realitanya, Jepang hanya mengambil alih kekuasaan dan menerapkan sistem kolonialisme yang berkali-kali lebih kejam daripada Belanda, mulai dari kerja paksa atau *romusha* untuk membangun infrastruktur secara gratis, pekerja bekerja tanpa upah dan tanpa makanan yang cukup bahkan cenderung sangat kekurangan.⁶³

Kemunduran Jepang bermula pada tahun 1943 ketika kekuatannya terdesak oleh Amerika Serikat. Jepang mulai goyah dan sadar bahwa mereka membutuhkan kekuatan lain untuk menunjang kekuatan mereka, akhirnya mereka melakukan propaganda lainnya dengan membentuk organisasi militer dan semi militer yang diberi nama Keibodan dan Seinendan.⁶⁴ Selain dua organisasi tersebut, ada pula pasukan yang dikenal dengan pasukan Heiho dan PETA (Pembela Tanah Air).

Kehadiran Jepang di Indonesia juga memberikan dampak yang baik bagi rakyat Indonesia, salah satunya adalah keinginan untuk merdeka yang semakin kuat, kepercayaan akan kemampuan mereka sendiri untuk merdeka. Setelah secara tidak langsung telah dijajah dimanfaatkan oleh Jepang, rakyat Indonesia pun sadar dan segera ingin melepaskan diri dari cengkraman Jepang. Indonesia menyadari adanya peluang tersebut setelah mengetahui kemunduran yang dialami Jepang setelah jatuhnya bom atom di Hiroshima Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus, selain itu kemenangan Uni Soviet atas wilayah Jepang bagian utara semakin

⁶³Marwati Djoned Poesponegoro. 1984. Sejarah Nasional Indonesia. Balai Pustaka

⁶⁴*Ibid.*, hal.56

membuat Jepang kehilangan kekuatannya.⁶⁵ Kekalahan Jepang terhadap sekutu terjadi pada tanggal 15 Agustus 1945 ditandai dengan pengakuan kaisar yang menyerah tanpa syarat terhadap sekutu⁶⁶

Pada periode sebelum kemerdekaan ini, motif Jepang menggandeng Indonesia hanya sekedar diperuntukan sebagai mitra dagang, dan murni hubungan antar perdagangan semata. Akan tetapi, setelah Jepang sadar bahwa Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah ruah membuat Jepang mulai serakah dan beralih keinginan untuk menguasai Indonesia, terlebih lagi situasi yang terjadi pada saat itu dibarengi dengan berlanjutnya perang dunia ke-2 yang sudah pasti membutuhkan bahan-bahan penunjang perang seperti halnya minyak bumi, dan Indonesia pada saat itu dianggap sebagai salah satu negara yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut dan menopang Jepang untuk meraih kemenangannya.

A.2. Hubungan Bilateral Indonesia Jepang Pasca Kemerdekaan

Hubungan Jepang setelah masa kolonialisme ditambah lagi kekalahan Jepang pada perang dunia II menjadikan titik awal renggangnya hubungan diantara keduanya. Ambisi Jepang untuk melakukan ekspansi terhenti karena banyaknya kerusakan dan kerugian selama perang yang harus ditebus Jepang untuk kembali bangkit dari keterpurukan. Sehingga kebijakan lebih condong pada *nonmiliter*, yang cenderung berfokus pada

⁶⁵Ibrahim Isa. 2015. Bom Atom atas Hiroshima Nagasaki, hal.37

⁶⁶Marwati Djoned Poesponegoro. 1984. Sejarah Nasional Indonesia. Balai Pustaka

rehabilitasi sebagai usaha perbaikan dan membangun lagi negara dari kerugian besar akibat perang. Jepang merupakan negara yang terbilang cepat bangkit dan berhasil melalui keterpurukan, dengan mengedepankan Industrialisasi. Jepang yang mulanya miskin mulai mampu bersaing dengan negara besar dan maju lainnya.

Setelah beberapa tahun renggang, terjalinnya hubungan baik Jepang dan Indonesia dimulai karena keikutsertaan Jepang dalam Konferensi San Fransisco tahun 1951 atas inisiasi Amerika Serikat. Secara khusus perjanjian San Fransisco membahas perihal pampasan perang. Perjanjian pampasan perang merupakan sebuah perjanjian diantara pihak yang sebelumnya terlibat perang, dimana pihak yang menjadi pemenang dalam perang diharuskan atau dipaksa untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang kalah dalam perang sebagai ganti kerugian material selama terjadinya perang.⁶⁷ Negara yang juga menyepakati perjanjian pampasan perang adalah Indonesia dan Jepang. Keduanya menandatangani perjanjian pampasan perang pada 20 Januari 1958, dan hubungan diplomatik yang resmi mulai dilakukan pada 15 April 1958.⁶⁸

Perundingan pampasan perang memakan waktu yang cukup lama, hal tersebut dikarenakan konstelasi tarik ulur politik Indonesia karena pada saat itu Indonesia membutuhkan banyak bantuan. Pada tahun 1957 bulan

⁶⁷Hassan Shadily. Ensiklopedi Indonesia. *Ichtiar Baru-Van Hoeve* dan *Elsevier Publishing Projects*. Jakarta, 1984. hal.529

⁶⁸Masashi Nishihara. 1994. Sukarno, Ratna Sari Dewi dan Pampasan Perang : Hubungan Indonesia-Jepang 1951-1966. Jakarta:Pustaka Utama Grafiti, hal.71

Desember, disusun momerandum Kobayashi-Djuanda yang isinya terkait jumlah pampasan perang yang diberikan Jepang untuk Indonesia berjumlah \$230 juta selama 12 tahun.⁶⁹ Tahun 1958 merupakan titik balik hubungan baik diantara Jepang dan Indonesia. Untuk menindaklanjuti perjanjian pampasan perang dan menunjang hubungan diplomatik diantara keduanya, Indonesia kemudian membuat sebuah kantor perwakilan di Tokyo dan menempatkan konsulat Jenderal di sana. Hubungan diplomatik yang intensif juga didukung dengan dibukanya jalur penerbangan antara Jepang dan Indonesia pada tahun 1963.⁷⁰

A.3. Hubungan Indonesia-Jepang pada Masa Orde Lama-Orde Baru

Meskipun terjadi sejarah kelam antara Indonesia dan Jepang, tidak menghambat hubungan keduanya untuk melakukan kerjasama. Setelah proklamasi diproklamirkan dan kemerdekaan telah diakui oleh negara lain meskipun belum menyeluruh, hubungan Jepang dan Indonesia semakin intensif terjadi. Sejak memasuki masa Orde Lama hingga Orde Baru, Jepang dan Indonesia mulai melancarkan hubungan diplomasi dan kerjasama mereka menjadi lebih dinamis dengan harapan kerjasama yang lebih baik dan menguntungkan. Pada masa orde lama, dibawah kepemimpinan Soekarno aktifitas politik luar negeri Indonesia masih seputar mencari pengakuan dari negara lain, agar posisi Indonesia sebagai

⁶⁹Masashi Nishihara. 1994. Sukarno, Ratna Sari Dewi dan Pampasan Perang : Hubungan Indonesia-Jepang 1951-1966. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti hal.79

⁷⁰Kedutaan besar Jepang di Indonesia. [Internet] http://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html diakses pada 12 Maret 2018

negara merdeka sah dimata dunia serta upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, menjunjung tinggi sikap anti kolonialis dan imperealis serta menutup politik luar negeri dari negara-negara barat.⁷¹ Soekarno sendiri terkenal dengan politik luar negerinya yang disebut politik konfrontasi.⁷² Pada orde lama, gaya kepemimpinan Soekarno dalam bidang ekonomi menjunjung semboyan berdiri diatas kaki sendiri” yang mencerminkan sikap anti barat, dan sikap tidak melulu bergantung dengan barat.⁷³ Dikarenakan hal tersebut, pada era kepemimpinnya hubungan Indonesia dengan barat cenderung tidak baik karena dari awal, Indonesia sudah tidak ingin mendekatkan diri kepada Barat.

Bergeser menuju kepemimpinan Soeharto, sangat berbanding terbalik dengan Soekarno. Soeharto justru cenderung terbuka dan menerima sebanyak-banyaknya investasi asing yang ditawarkan pada Indonesia. Menurutnya hal tersebut merupakan cara agar kondisi ekonomi Indonesia bisa kembali stabil pasca keterpurukan ekonomi usai kepemimpinan Soekarno yang masih belum mendapat penanganan secara menyeluruh. Untuk melancarkan pembangunan ekonomi yang digadang-gadangnya, Soeharto juga terbuka pada perdagangan bebas. Negara yang turut mananamkan investasinya ke Indonesia secara besar-besaran adalah

⁷¹Bantarto Bandoro. 1994. Hubungan Luar Negeri Indonesia selama Orde Baru, CSIS, Jakarta, hal.93-124

⁷²Imantri Perdana dkk. Konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1963-1966 (Dampak Terhadap Perekonomian Masyarakat Tanjung Balai Karimun.Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau.

⁷³D.N. Aidit. 1965. Politik Luar Negeri dan Revolusi Indonesia. Djajasan Pembaruan, Jakarta.

Jepang. Selain itu Jepang juga memberikan berbagai macam bantuan kepada Indonesia. Keterbukaan terhadap modal asing ini dimuat dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1967.⁷⁴ Akan tetapi, kebijakannya juga yang pada akhirnya membuat Indonesia terbelit hutang dengan asing yang terus beranak pinak hingga saat ini. Sejak awal pemerintahannya, inflasi melonjak sangat tinggi hingga mencapai presentase 650% pertahun.⁷⁵

Konsep yang diusung Soeharto adalah konsep pembangunan. Dalam kepemimpinannya upaya untuk memaksimalkan pasokan modal dari bangsa barat terus ditingkatkan, termasuk juga sekutu-sekutu AS yang salah satunya adalah Jepang. Beberapa langkah yang ditempuh untuk melancarkan misinya salah satunya adalah menggabungkan diri kembali ke dalam PBB setelah sebelumnya sempat menyatakan diri keluar pada era kepemimpinan Soekarno. PBB memberikan sumbangsih yang cukup besar kepada Indonesia pada masa orde baru, dengan dibentuknya IGGI (Inter-Governmental Group on Indonesia) pada Februari 1967.⁷⁶ IGGI merupakan forum Internasional yang berperan sebagai perantara antara

⁷⁴BBC Indonesia. 2008. Ekonomi di bawah Orde Baru [Internet] http://www.bbc.co.uk/indonesian/indepth/story/2008/01/080127_suhartoconomy.shtml diakses pada 28 Desember 2018

⁷⁵Ibid,diakses pada 28 Desember 2018

⁷⁶Nimah Affah. Politik Luar Negeri Indonesia Era Orde Baru Tinjauan Developing Country suatu Telaah Awal. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UIN Sunan Kalijaga

bank-bank Internasional dan negara-negara yang membutuhkan bantuan keuangan seperti halnya Indonesia.⁷⁷

Tingginya kebutuhan akan modal asing ini didasarkan pada alasan bahwa pembangunan membutuhkan modal dan teknologi yang cukup banyak. Pada mulanya, konsep pembangunan ekonomi yang diusung Soeharto membawa respon yang cukup baik bagi kesejahteraan masyarakat disebagian golongan, akan tetapi lambat laun penderitaan justru dituai, hal tersebut dikarenakan kondisi negeri yang mencapai tingkat inflansi semakin tinggi, menyebabkan pengangguran meningkat, ditambah lagi rendahnya kemampuan untuk membangun industri semakin menambah point keterpurukan Indonesia menjelang berakhirnya orde baru.

A.4. Hubungan Indonesia dan Jepang di Era Reformasi

Berawalnya era orde baru ditandai dengan turunnya Soeharto dari tahta kepemimpinanya, yang kemudian digantikan oleh BJ Habibie. Perubahan terjadi mulai dari jenis rezim pemerintahan yang mulanya otoriter dibawah kepemimpinan Soeharto menjadi pemerintahan yang demokratis dibawah kepemimpinan BJ Habibie. Era pemerintahan yang menerapkan sistem demokratis diawali pada era presiden BJ Habibie dan presiden setelahnya, seperti Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono dan yang saat ini menjabat yakni presiden Joko Widodo.

⁷⁷Syafarudin Alwi. *IGGI dan Pembatasan Sektor Swasta*. UNISIA 10.XI.IV.1991

Pergantian kepemimpinan tentunya berimplikasi pada kebijakan luar negeri, setiap periode kepemimpinan memiliki corak tersendiri, tergantung juga pada isu-isu dan situasi yang berkembang yang sedang dihadapi oleh negara Indonesia. Hubungan Jepang dan Indonesia membaik ketika memasuki periode 1980an, dimana permasalahan seperti investasi, alih teknologi, bantuan keuangan dan perdagangan muncul sebagai isu yang populer dalam periode 1980an.⁷⁸ Akan tetapi dari berbagai isu yang mencuat, isu ekonomi masih menjadi primadona utama, disamping isu keamanan yang juga menjadi perhatian bersama.⁷⁹ Pada periode tersebut, Jepang menjadi investor asing terbanyak hingga mencapai nominal 24,8% dari total keseluruhan investasi yang masuk ke Indonesia.⁸⁰ Nilai perdagangan yang terjadi antara Jepang dan Indonesia pada dasawarsa itu menunjukkan defisit dialami Jepang, sedangkan Indonesia cenderung surplus, pada 1989 misalnya ekspor Jepang ke Indonesia mencapai 3,3 miliar dollar AS, sangat jauh berbanding jumlah ekspor Indonesia ke Jepang yang dapat mencapai 11 Milyar dollar AS.⁸¹

Selain itu, isu bantuan keuangan merupakan salah satu isu yang tidak kalah menarik pada dasawarsa tersebut. Bantuan keuangan yang terkenal oleh Jepang untuk Indonesia adalah ODA (*Official Development Assistance*). Indonesia merupakan negara penerima ODA terbesar oleh

⁷⁸Bantoro Bandoro. 1994. Hubungan luar negeri Indonesia selama Orde Baru. Jakarta : Centre for Strategic and International Studies

⁷⁹Marwati Djoned Poesponegoro. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia*. Balai Pustaka

⁸⁰Schwarz dan Vasikiotis, 1991 dalam Bahri, M.M., 2004. *International Aid for Development? An Overview Japanese ODA to Indonesia*. Makara, Sosial Humaniora

81 *Ibid*

Jepang. Selain ODA, langkah yang diterapkan Jepang alih-alih untuk mempererat hubungan baik dengan Indonesia adalah proposal kerjasama ekonomi berbasis perdagangan bebas yang dikenal dengan sebutan *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*. Konsep EPA ini berbeda dengan FTA, meskipun masih berada pada cakupan FTA, tetapi EPA memuat beberapa komponen yang lebih kompleks. Perundingan hingga persetujuan EPA terjadi pada dua periode yang berbeda. Pada mulanya, Jepang mengajukan proposal permohonan pembentukan kepada presiden Megawati di Tokyo pada tahun 2003.⁸² Akan tetapi belum usai disepakati, Presiden Megawati harus lengser dari kursi kepemimpinannya sehingga dilanjutkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perundingan resmi IJEPA disetujui oleh Pemerintah Indonesia dan Jepang ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Jepang dengan resmi pada bulan Juni 2005. Kemudian pada 20 Agustus 2007 Perdana menteri Shinzo Abe menemui SBY dan menandatangani perjanjian tersebut. IJEPA sendiri mulai aktif diterapkan pada 1 Juli 2008.⁸³

⁸²Nuthaila Rahmah. 2017. Hubungan Indonesia – Jepang dalam Perjanjian *Indonesia-Japan Economic partnership Agreement* di bidang Pertanian. Skripsi mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial & Politik. Universitas Hasanuddin.

⁸³Kedutaan besar Jepang di Indonesia. [Internet] terdapat pada [http://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html] diakses pada 12 Maret 2018

B. Economic Partnership Agreement

B.1. Sejarah *Economic Partnership Agreement* (EPA)

Free Trade Agreement (FTA) pada dasarnya berbeda dengan *Economic Partnership Agreement* meskipun sama-sama mengusung pemahaman mengenai perdagangan bebas. Keduanya ibarat serupa tapi tak sama. FTA merupakan perjanjian Internasional guna menghapuskan tarif antar negara atau wilayah dan untuk menghapus peaturan dibidang investasi asing dalam perdagangan jasa. Sedangkan EPA, lebih kompleks dibandingkan FTA. Dengan kata lain, EPA memang tidak terlepas dari FTA, namun perjanjian yang dimuat didalamnya lebih kompleks dan inovativ dibandingkan FTA. EPA pada dasarnya mencakup ketentuan yang sama dengan FTA, namun EPA cenderung melampaui ruang lingkup FTA. EPA memberikan pergerakan bebas seperti kompetisi dan kerjasama Internasional, prosedur *bea cukai* serta penyelesaian sengketa Internasional.⁸⁴

Perjanjian kemitraan ekonomi (EPA) biasanya ditandatangani oleh dua negara atau lebih, perjanjian tersebut terbukti cukup populer di seluruh dunia pada abad ke-21 dengan negara-negara di kawasan Eropa, Asia, Afrika, dan pasifik.⁸⁵ Semuanya bergabung untuk bertahan hidup dan bersaing dalam lingkungan ekonomi Internasional yang semakin dinamis dan bergejolak melalui EPA.

⁸⁴David Ingram. *What is an economic partnership agreement?* [Internet] <https://smallbusiness.chron.com/economic-partnership-agreement-3888.html> diakses pada 5 Januari 2019

⁸⁵*Ibid*, diakses pada 5 Januari 2019

Dari pemaparan tersebut dapat ditarik pengertian secara umum bahwa *Economic Partnership Agreement* (EPA) merupakan bentuk perjanjian internasional yang didalamnya memuat kesepakatan berupa deregulasi peraturan-peraturan bagi penanaman modal dan pengendalian imigrasi sebagai tambahan dari isi kesepakatan.⁸⁶

Kesamaan EPA dan FTA adalah penurunan atau penghapusan tarif, sedangkan pembedanya, didalam EPA bidang yang diatur jauh lebih kompleks seperti halnya memfasilitasi bergeraknya sumber daya manusia, barang dan modal, hak kekayaan intelektual (HKI) serta aturan kebijaksanaan persaingan.⁸⁷

Salah satu negara dikawasan Asia yang tercatat melakukan EPA dan menginisiasi EPA bersama negara lain adalah Jepang. Tercatat ada 8 negara yang digandeng Jepang untuk melakukan kerjasama dibawah kerangka *Economic Partnership Agreement* (EPA), 6 negara diantaranya merupakan negara anggota ASEAN yakni, Singapura yang resmi menandatangi EPA pada tahun 2002, Malaysia pada tahun 2005, Philipina pada tahun 2006, serta disusul 3 negara lainnya yakni Thailand, Brunei Darussalam serta Indonesia pada tahun yang sama yakni 2007.⁸⁸ Bersama dengan Indonesia, kerjasama berkonsepkan EPA dikenal dengan sebutan IJEPA dan resmi diimplementasikan pada 1 Juli 2008, setelah sebelumnya melalui beberapa tahap perundingan.

⁸⁶H. Bahtiar. 2016. *Japan Economic Partnership Agreement (JEP)*. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Pasundan, Bandung.

⁸⁷ *Ibid.* hal.8

⁸⁸Kedutaan besar Jepang di Indonesia. [Internet] terdapat pada [http://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html] diakses pada 12 Maret 2018

B.2.Kebijakan Tarif yang diatur dalam EPA

Dengan menerapkan EPA, negara dapat memperoleh tarif yang lebih rendah daripada negara lain. Organisasi perdagangan dunia (WTO) memuat prinsip yang disebut dengan *Most Favored Nation* (MFN), yang maknanya setiap anggota WTO yang terlibat harus menerapkan perlakuan yang sama antara satu dan lainnya. Namun, dengan menerapkan EPA negara akan mendapatkan keuntungan lebih berupa tarif yang lebih rendah dibanding yang lainnya, dalam situasi ini adanya EPA disebut-sebut sebagai *stumbling block*.⁸⁹

Penentuan tarif di dalam EPA digolongkan menjadi 3 tingkatan, diantaranya⁹⁰ :

- a. Ketika tarif EPA diimplementasikan tingkat tarif menjadi 0%
 - b. Terdapat penghapusan tarif secara bertahap semenjak EPA diimplementasikan, melalui kesepakatan periode tertentu
 - c. Tidak ada penghapusan tarif atau pengurangan (tarif MFN yang berlaku), hal ini berarti apabila tidak ada pengurangan tarif yang disepakati dalam EPA maka tarif MFN yang diberlakukan. Dengan kata lain, negara yang terlibat dalam WTO dan EPA bisa memilih mana kebijakan penurunan tarif yang lebih menguntungkan.

⁸⁹MOF Japan. *Japan's Economic Partnership Agreement.* 2008. [Internet] http://www.customs.go.jp/english/epa/files/japans_epa.pdf diakses pada 5 Juni 2018

⁹⁰H. Bahtiar. 2016. *Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*. Universitas Pasundan, Bandung.

Bagi negara yang menerapkan EPA, terdapat syarat penting yang harus dipatuhi untuk menjaga legalitas asal barang, ketentuan tersebut dikenal dengan nama ketentuan asal barang. Ketentuan asal barang digunakan untuk menilai setiap produk yang akan di impor memenuhi syarat atau tidak, kemudian diperlukan juga guna menjaga keaslian barang berasal, benar tidaknya produk berasal dari negara yang terlibat dalam perjanjian. Dalam hal ini eksportir dituntut dan diharuskan untuk membuktikan kepada pemerintah berwenang bahwa barang yang dieksport merupakan barang yang berasal dari negara terkait yang terikat dalam kerjasama EPA, untuk membuktikan asal barang tersebut eksportir harus berbekal surat keterangan asal.⁹¹ Surat keterangan asal juga dibutuhkan eksportir guna membuktikan bahwa produk yang dibawa memenuhi syarat untuk mendapatkan penurunan tarif sesuai perjanjian EPA.

Economic Partnership Agreement (EPA) memuat 3 pilar utama yang dijadikan dasar dari pembuatan EPA, diantaranya⁹² :

- a. Liberalisasi, pengapusan hambatan perdagangan dan investasi berupa tarif dan memberi kepastian hukum
 - b. Fasilitasi, guna meningkatkan kepercayaan bagi investor
 - c. Kerjasama, memuat kesepakatan untuk meningkatkan kapasitas melalui *capacity building* untuk sektor-sektor industri prioritas

⁹¹H. Bahtiar. 2016. Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Pasundan, Bandung.

⁹²MOF Japan. Japan's Economic Partnership Agreement. 2008. [Internet] http://www.customs.go.jp/english/epa/files/japans_epa.pdf diakses pada 5 Juni 2018

C. Kepentingan Jepang dalam IJEPA

Hubungan sejarah yang kurang baik antara Jepang dan Indonesia tidak lantas menghambat keduanya untuk bekerjasama dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi. Perwujudan kerjasama Jepang dan Indonesia dibidang ekonomi direalisasikan melalui IJEPA, suatu bentuk kerjasama yang menawarkan gagasan baru, lebih kompleks dibandingkan bentuk kerjasama yang diatur didalam *World Trade Organization* (WTO), kemunculan konsep kerjasama *Economic Partnership Agreement* (EPA) memang tidak sepopuler WTO, akan tetapi pada dasarnya keuntungan yang ditawarkan didalam EPA tidak kalah besar dibandingkan WTO, bahkan bisa jadi lebih menguntungkan dikarenakan kebijakan tarif yang diatur didalam EPA lebih sedikit, sehingga acap kali bentuk kerjasama EPA ini disebut sebagai WTO plus.

Selain tiga pilar dasar yang diusung IJEPA melalui konsep besar EPA diantaranya; (1) Liberalisasi (2) Fasilitasi dan (3) Kerjasama.⁹³ IJEPA juga secara khusus memiliki tujuan, sejak dilakukannya perundungan dalam pembentukan IJEPA, Jepang bersama dengan Indonesia sepakat merumuskan tujuan IJEPA diantaranya;⁹⁴

- a. Meningkatkan nilai perdagangan diantara kedua negara
 - b. Mendorong peningkatan investasi Jepang di Indonesia

⁹³MOF Japan. Japan's Economic Partnership Agreement. 2008. [Internet] http://www.customs.go.jp/english/epa/files/japans_epa.pdf diakses pada 5 Juni 2018

⁹⁴Kedutaan besar Jepang di Indonesia. [Internet] terdapat pada [http://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html] diakses pada 12 Maret 2018

- c. Diharapkan mampu mengembangkan industri dan teknologi
 - d. Memperdalam keterlibatan Indonesia dalam jaringan produksi regional dan internasional
 - e. Meningkatkan lapangan pekerjaan

Berdasarkan *fact sheet* IJEPA per tahun 2018, tujuan dari IJEPA ini telah diwujudkan melalui beberapa agenda sebagai berikut;⁹⁵

Peningkatan kinerja perdagangan dengan menerapkan pengurangan dan penghapusan tarif dalam ekspor impor barang, peningkatan investasi dari Jepang berupa didirikannya perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi transportasi Jepang di Indonesia, pengiriman tenaga kerja ahli yakni perawat dan perawat lansia dari Indonesia ke Jepang, peningkatan daya saing yang diwujudkan melalui MIDEC, MIDEC adalah kerja sama teknis dalam rangka peningkatan daya saing industri nasional melalui pelatihan, pengiriman tenaga ahli, kunjungan kerja ke industri, serta seminar.⁹⁶

C.1.Peningkatan kinerja perdagangan dengan menerapkan pengurangan dan penghapusan tarif dalam ekspor impor barang

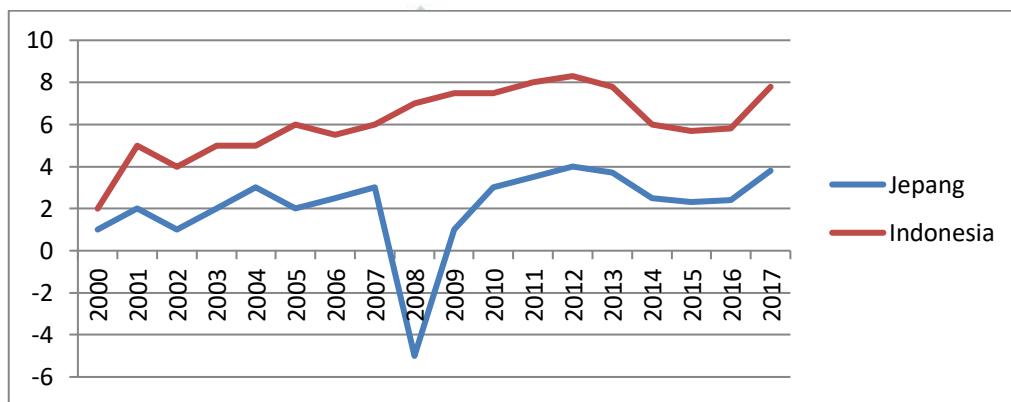
Perdagangan Indonesia dan Jepang menunjukkan tren yang positif bagi Indonesia, dimana nilai perdagangan Indonesia surplus dan Jepang cenderung defisit sejak IJEPA diimplementasikan. Situasi ini

⁹⁵Fact Sheet Indonesia-Japan. 2018. *Economic Partnership Agreement (IJEPA)*

⁹⁶Kemenprin. 2018. *Midec Belum Optimal untuk Indonesia.* [http://www.kemenperin.go.id/artikel/4203/MIDEC-Belum-Optimal-bagi-Indonesia.](http://www.kemenperin.go.id/artikel/4203/MIDEC-Belum-Optimal-bagi-Indonesia) diakses pada 10 Januari 2019

padanya tidak jauh berbeda ketika IJEPA belum diimplementasikan, hanya saja nilai ekspor Indonesia ke Jepang lebih banyak dibandingkan sebelum IJEPA diterapkan.

Grafik 4.1 Tren Perdagangan Indonesia Jepang 2000-2017

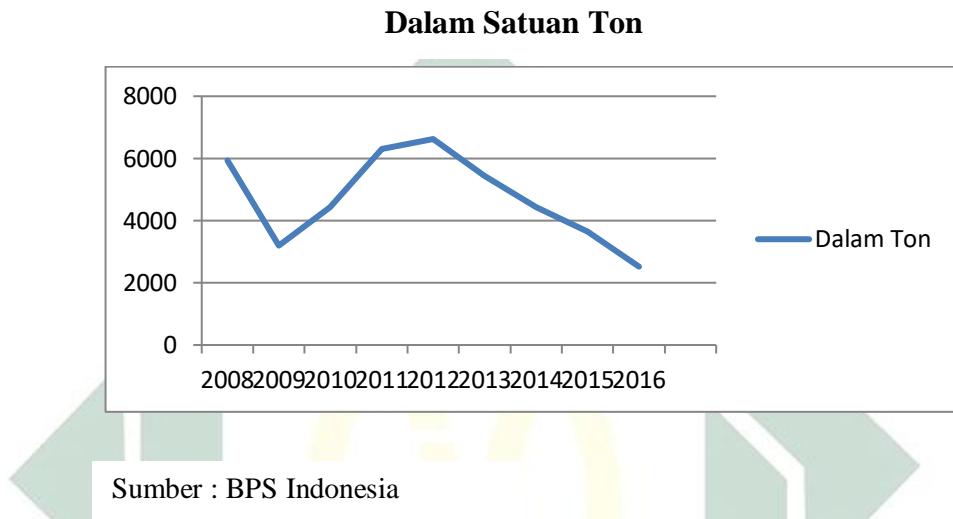


Sumber : *International Monetary Fund*

Meskipun tidak selalu mengalami kenaikan, nilai perdagangan Indonesia selalu lebih tinggi dibandingkan Jepang ke Indonesia, keduanya cenderung mengalami kenaikan setelah IJEPA diterapkan. Sebagai negara berkembang yang masih terbatas dalam sektor industri teknologi, maka ekspor Indonesia ke Jepang masih didominasi oleh barang *raw material* yang menjadi andalan dan komoditas utama Indonesia baik *migas* maupun *non migas* diantaranya, (1) Kelapa sawit, Indonesia merupakan negara yang mendominasi pasar minyak sawit didunia, produksi minyak sawit Indonesia bisa mencapai 31 juta ton pertahun. (2)Karet alam, (3)Rumput laut, (4)Udang (5) Minyak bumi, tidak diragukan lagi sebagai negara yang kaya akan minyak bumi, membuat minyak bumi sebagai primadona sektor migas yang diekspor

Indonesia ke Jepang dalam beberapa periode.⁹⁷ Jepang sendiri tercatat sebagai negara yang mendapat pasokan ekspor minyak bumi terbesar dari Indonesia dibandingkan negara-negara lainnya.⁹⁸

Grafik 4.2 Ekspor Minyak Bumi Indonesia ke Jepang 2008-2017



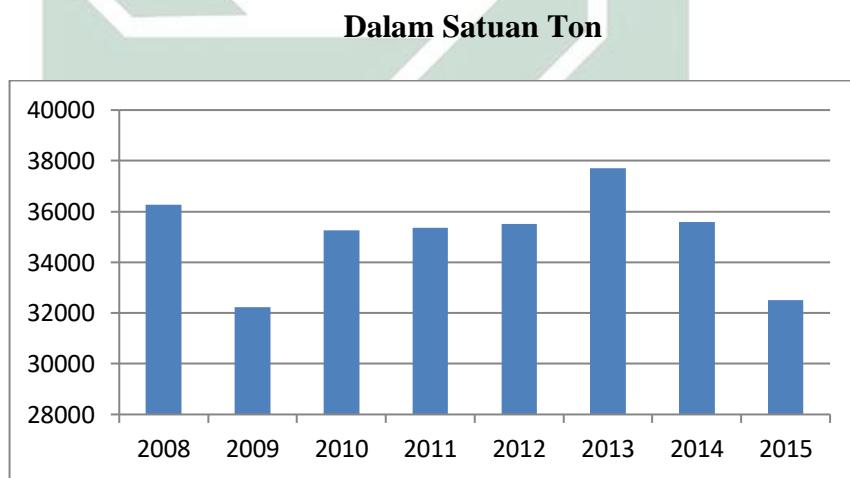
Dari data di atas, meskipun mengalami penurunan pada beberapa waktu bukan berarti Jepang tidak diuntungkan. Penurunan nilai ekspor minyak bumi ke Jepang dikarenakan menurunnya produksi minyak bumi yang dihasilkan Indonesia pada beberapa periode. Hal tersebut juga berdampak pada negara-negara lain yang mendapatkan pasokan minyak bumi dari Indonesia. Akan tetapi, Jepang tetap menjadi negara yang mendapatkan pasokan terbesar dibandingkan negara-negara lain, dan kondisi tersebut berlangsung secara stabil sejak IJEPA diimplementasikan.

⁹⁷Rizki Nugraha. 2016. Komoditi Ekspor Andalan Indonesia.<https://www.dw.com/id/7-komoditi-ekspor-andalan-indonesia/g-19297445> diakses pada 7 Januari 2019

⁹⁸Badan Pusat Statistik. Laporan tahun 2008-2016.

Di sisi lain, Indonesia juga memiliki komoditi andalan berupa batu bara selain minyak bumi. Komoditi batu bara juga menjadi potensi ekspor sektor *migas*. Batu bara merupakan penyumbang 41% energi pembangkit listrik di dunia, sehingga batu bara juga termasuk komoditi ekspor yang berpotensi bagi Indonesia.⁹⁹ Selain itu, batu bara juga merupakan alternatif energi selain minyak bumi yang saat ini semakin sedikit jumlahnya di dunia. Sejak tahun 2010 Indonesia sudah mensuplai kebutuhan batu bara Jepang mencapai 20% dengan total 35,3 juta ton. Total ekspor batu bara Indonesia ke Jepang mengalami kenaikan, setelah sebelumnya pada periode 2006 hanya mencapai 27,3 juta ton.¹⁰⁰ Jepang merupakan salah satu negara penerima pasokan terbesar batu bara dari Indonesia dengan jumlah ekspor cenderung stabil.

Diagram 4.3 Total Ekspor Batu Bara Indonesia ke Jepang 2008-2015



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

⁹⁹World bank data 2010

¹⁰⁰Databooks. Volume Eksport Batu Bara Indonesia ke Jepang [Internet] <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/11/volume-ekspor-batu-barab-indonesia-ke-jepang-2002--2014> diakses pada 10 Januari 2019

Besarnya nominal ekspor batu bara ke Jepang salah satunya disebabkan oleh skema penurunan tarif yang diatur didalam IJEPA sebagai bentuk pengurangan hambatan kerjasama Internasional. Dalam sektor perdagangan barang, perjanjian IJEPA memuat konsesi khusus berupa penghapusan tarif atau penurunan tarif bea masuk seperti penurunan tarif ke 0% pada saat IJEPA diberlakukan (*fast track*), dan penurunan tarif menjadi 0% dalam jangka waktu tertentu (*normal track*).

Kondisi perdagangan Indonesia Jepang yang menunjukkan fakta demikian, pada dasarnya lebih menguntungkan Jepang. Di satu sisi, dengan adanya IJEPA kebijakan penurunan dan penghapusan bea masuk impor meringankan Indonesia untuk melakukan ekspor dalam jumlah yang lebih besar, disisi lain Jepang sangat diuntungkan karena semakin besar jumlah ekspor komoditi minyak bumi dan batu bara akan sangat membantu pemenuhan kebutuhan bahan bakar yang menunjang proses produksinya.

Sejak tahun 1970, Jepang menempati posisi kedua dalam perekonomian dunia, hal ini sejalan dengan kebutuhan minyak bumi Jepang. Dalam hal impor energi dan minyak bumi, Jepang menempati posisi kedua setelah Amerika Serikat. Sebagai negara yang hampir tidak memiliki sumber daya alam di dalam negeri, kebutuhan energi Jepang cenderung tetap tinggi.¹⁰¹ Sehingga Jepang hanya bisa mengandalkan

¹⁰¹Wawancara Dr. Ken Koyama dalam *Pertamina Energy Outlook*. 2015 [Internet] <https://www.viva.co.id/arsip/565157-ini-cara-jepang-stabilkan-pasokan-energi> diakses pada 11 Januari 2019

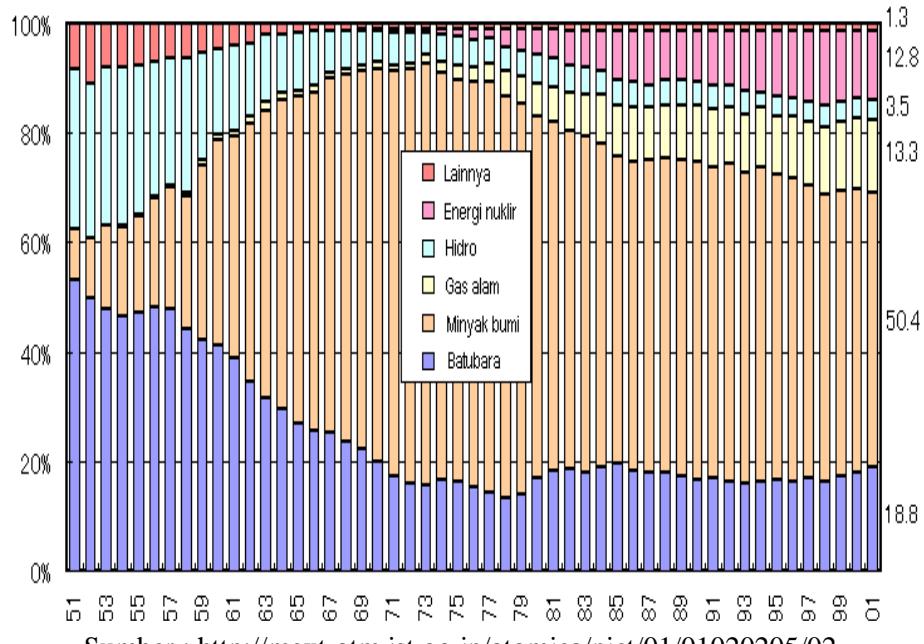
pasokan energi dari luar sekitar 80%, sedangkan kebergantungan pada pasokan minyak bumi hampir 100%, meskipun Jepang sudah berupaya untuk menggunakan *Energy Mix*.¹⁰² *Energy Mix* merupakan suatu upaya Jepang untuk menggunakan beberapa sumber energi sekaligus, dan tidak hanya bergantung pada satu sumber energi saja. Meskipun demikian, kebutuhan Jepang akan minyak bumi masih tidak terelakan.

Berdasarkan diagram di bawah ini, dapat diketahui bahwa Jepang sudah menggunakan sumber energi lainnya seperti hidro, gas alam, nuklir, batu bara dan beberapa lainnya. Akan tetapi kebutuhan akan minyak bumi dan batu bara tetap tinggi. Sehingga semakin tinggi impor batu bara dan minyak bumi dari Indonesia akan semakin menguntungkan Jepang.

¹⁰²Wawancara Dr. Ken Koyama dalam *Pertamina Energy Outlook*. 2015 [Internet] <https://www.viva.co.id/arsip/565157-ini-cara-jepang-stabilkan-pasokan-energi> diakses pada 11 Januari 2019

Grafik 4.4 Perubahan Struktur Kebutuhan Energi Primer Jepang

Tahun 1951-2001



Kebutuhan Jepang terhadap minyak masih sangat tinggi. Pada tahun 2005 konsumsi minyak bahkan mencapai 5 juta barel perhari menjadikan Jepang sebagai konsumen ketiga terbesar setalah Amerika Serikat dan Tiongkok.¹⁰³ Minyak bumi merupakan salah satu substansi penting untuk mendukung industrialisasi dan kemajuan ekonomi negara-negara maju, munculnya kompetitor baru seperti Tiongkok mengharuskan Jepang untuk tetap menjaga stabilitas pasokan energinya dari luar, mengingat bahwa Jepang merupakan negara yang saat ini tidak memiliki sumber daya alam dalam negeri.¹⁰⁴

¹⁰³IEA. 2007. *International Energy Agency*

¹⁰⁴IEA. 2003. *Energy Policies of IEA Countries* Jepang negara anggota IEA (International Energy Agency) mengenai Jepang sebagai negara anggota IEA paling kritis dalam ketersediaan sumber daya alam

Meningkatnya kompetitor memasuki abad 21 membuat Jepang berada pada situasi yang lebih kompleks, ditambah lagi kemungkinan adanya gangguan terhadap pasokan energi dari Timur tengah yang merupakan negara pemasok energi utama bagi Jepang dikarenakan instabilitas politik di kawasan tersebut pasca perang Irak yang masih menyisakan persoalan akut, begitu juga ancaman terorisme.¹⁰⁵ Selain itu, merebaknya gelombang revolusi di negara-negara Arab sejak akhir tahun 2010 memperkuat ketidakpastian.¹⁰⁶ Menyadari hal tersebut, melalui konsep *Economic Partnership Agreement*, Jepang mulai merumuskan kerjasama bilateral dengan membidik negara-negara di kawasan Asia yang berpotensi dari segi sumber daya alamnya untuk menjaga stabilitas pasokan energinya berupa batu bara maupun minyak bumi, salah satunya Indonesia yang diwujudkan melalui IJEPA.

Disisi lain, surplusnya nilai perdagangan Indonesia dibanding Jepang sejak IJEPA diterapkan juga bersama naiknya tingkat impor Jepang ke Indonesia. Pada situasi seperti ini, Indonesia pada dasarnya yang cenderung dirugikan, mengingat bahwa sebagai negara yang masih terbatas dalam mengembangkan teknologi industri Indonesia hanya sebatas mengekspor barang *raw material*, sedangkan ekspor Jepang ke Indonesia cenderung didominasi oleh barang-barang seperti mesin dan suku cadang, produk plastik dan kimia, baja, perlengkapan listrik, suku cadang elektronik, mesin alat transportasi dan suku cadang mobil.

¹⁰⁵Muhammad Faris A. 2012. Paper Kebijakan Ketahanan Energi Jepang di abad 21 “Fundamentalisme Negara dan Diversifikasi Sumber Energi”

106 *Ibid*

C.2 Peningkatan investasi dari Jepang berupa didirikannya perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi transportasi Jepang di Indonesia.

Bukan hanya ekspor impor, implementasi IJEPA juga berdampak pada peningkatan investor Jepang di Indonesia, sejalan dengan misi IJEPA yang salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor Jepang untuk berinvestasi. Peningkatan investasi Jepang hingga tahun 2017 mencapai USD 4,9 Milliar dengan sektor utama investasi berupa listrik, industri alat angkutan dan transportasi, mesin dan elektronik. Peningkatan tren invetasi ini meningkat hingga 26,2% sejak IJEPA diberlakukan.¹⁰⁷ Hingga saat ini, total perusahaan Jepang yang berada di Indonesia hampir mencapai angka 1500, terjadi peningkatan lebih dari 45% dibandingkan dengan tahun 2006 sebelum IJEPA diimplementasikan, jumlah perusahaan yang masuk ke Indonesia 783 perusahaan dan mayoritas merupakan perusahaan yang bergerak dibidang teknologi transportasi.¹⁰⁸ Kebijakan Jepang memilih Indonesia sebagai negara tujuan investasi tidak terlepas dari realita upah pekerja murah, di Indonesia, gaji buruh hingga tahun 2018 hanya mencapai kisaran 107 hingga 289 dollar AS. Semakin rendah upah pekerja semakin rendah pula biaya produksi, keduanya akan berimplikasi pada harga jual barang buatan Jepang, terutama barang disektor industri otomotif yang menjadi

¹⁰⁷Kemendag.Fact Sheet Indonesia-Japan. 2018.*Economic Partnership Agreement (IJEPA)*

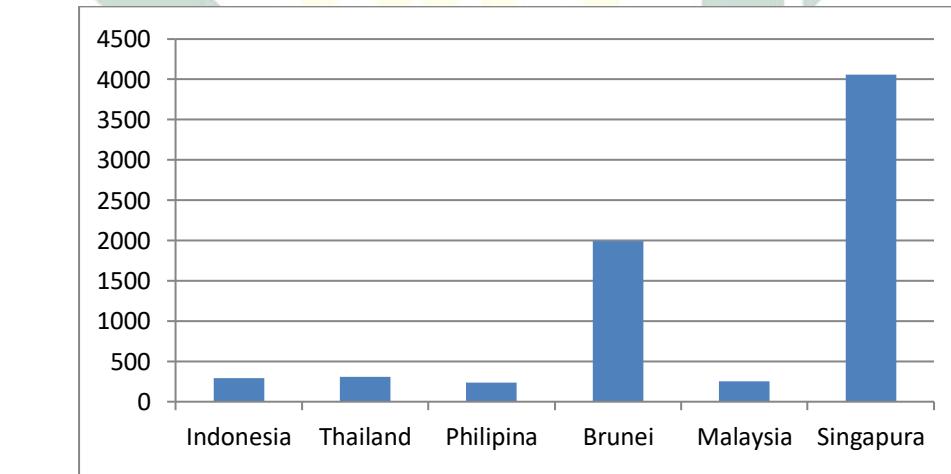
¹⁰⁸Kemenprin. 2018 <http://www.kemenperin.go.id/artikel/5707/1.500-Perusahaan-Jepang-Siap-Masuk-Indonesia> diakses pada 8 Januari 2019

produk andalan Jepang di Indonesia khususnya.¹⁰⁹ Terlebih lagi didukung oleh pola konsumtif masyarakat Indonesia yang cenderung tinggi.

Pada akhirnya keuntungan yang diperoleh Jepang akan lebih banyak dikarenakan Jepang mampu menekan daya saing industri otomotif yang Indonesia dengan mengandalkan harga jual lebih murah dibandingkan *brand* otomotif dari negara lain. Seperti yang tertera pada diagram di bawah ini, upah buruh negara-negara yang digandeng Jepang dalam konsep kerjasama EPA di kawasan Asia Tenggara memang cenderung murah.

Diagram 4.5 Upah Negara Asia yang tergabung di dalam EPA

Dalam US dollar per 2018



Sumber : *International Labour Organization* (diolah oleh penulis)

¹⁰⁹Paul Kennedy. 1995. Menyiapkan Diri Menghadapi abad ke-21. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

C.3. Pengiriman tenaga kerja ahli yakni *nurse* dan *careworker* dari Indonesia ke Jepang

Kerjasama IJEPA yang bersifat komprehensif tidak hanya membahas liberalisasi perdagangan dan jasa seperti yang lazim tertuang dalam FTA. IJEPA juga memuat perihal upaya peningkatan migrasi pekerja (*movement of natural person*), yang dalam realisasinya diwujudkan melalui pengiriman tenaga kerja *nurse* dan *careworker* ke Jepang.¹¹⁰ Perihal pengiriman perawat ke Jepang ini pada mulanya dibahas pada *Join Study Group Meeting* (JSG) pada tahun 2005.¹¹¹ Kesepakatan ini disetujui karena adanya masalah populasi yang dialami Jepang, dimana jumlah lansia di Jepang terus meningkat sedangkan pertumbuhan tidak produktif.¹¹² Penduduk yang berusia lanjut menjadi salah satu permasalahan bagi Jepang, hampir dari seperlima total populasi didominasi oleh lansia, proporsi jumlah penduduk usia lanjut diperkirakan akan terus bertambah hingga mencapai 32% ditahun 2030 dan 41% ditahun 2025.¹¹³ Oleh karena itu, melalui kerangka IJEPA, pengingiriman *careworker* dan *nurse* adalah salah satu langkah strategis yang ditempuh Jepang untuk mengatasi populasi lansia di negaranya.¹¹⁴

¹¹⁰Kemendag. Fact Sheet Indonesia-Japan. 2018. Economic Partnership Agreement (IJEPA)

¹¹¹Ministry of Foreign Affairs of Japan (MOFA).“*JIEPA-Joint Study Group Report*”.

¹¹²Reni K. Arianti. 2013. Pengaruh Profesionalisme, Pelatihan dan Motivasi terhadap Kinerja Nurse dan Cargiver di Indonesia, Jurnal MIX, Vol.IIIhal.112

¹¹³Koreishakai Sogo Kenkyu Kiko dalam Reni K. Pengaruh Profesionalisme, pelatihan dan motivasi terhadap keinerja *nurse* dan *caregiver* Indonesia, Jurnal MIX, Vol.III hal.112

¹¹⁴*Ibid.*, hal.113

Pengiriman perawat Indonesia ke Jepang dilaksanakan dengan program *G* to *G* dengan menindak lanjuti nota kesepahaman atau *Momerandum Of Understanding* (MoU) antara pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dengan pemerintah Jepang yang diwakili oleh *The Japan International Corporation of Welfare Service* (JIWELS) mengenai penempatan calon *nurse* (Kangoshi) dan calon *careworker* (Kaigofukushi) dari Indonesia ke Jepang.¹¹⁵ Kualifikasi perawat yang akan dikirim ke Jepang ini haruslah perawat yang sebelumnya telah lulus program keperawatan diseluruh Indonesia minimal D3 untuk *careworker* S1 untuk *nurse*.¹¹⁶

Melalui program *G* to *G* yang dimuat dalam IJEPA, Jepang sepakat untuk memberikan bantuan berupa pembekalan pendidikan bagi calon *nurse* dan *careworker* yang akan dikirimkan ke Jepang, selanjutnya para calon *nurse* dan *careworker* mengikuti proses ujian untuk dinyatakan lolos klasifikasi atau tidaknya. Akan tetapi, waktu pelatihan terbilang sangat singkat dan tidak maksimal.¹¹⁷ Calon *nurse* dan

¹¹⁵“Memorandum of Understanding Between The National Board for the Placement and Protection of Indonesian Overseas Workers And The Japan International Corporation of Welfare Services” dalam Mentari Dhea A. Peningkatan daya Saing Indonesia dibidang Keperawatan melalui IJEPA 2008-2013 mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

¹¹⁶BNP2TKI. Pengumuman Pendaftaran Program G to G ke Jepang untuk penempatan tahun 2017 [Internet] <http://www.bnpttki.go.id/read/11178/Pengumuman-Pendaftaran-program-G-to-G-ke-Jepang-untuk-penempatan-tahun-2017.html> diakses pada 12 Januari 2019

¹¹⁷Reni K. Arianti. 2013. Pengaruh Profesionalisme, Pelatihan dan Motivasi terhadap Kinerja Nurse dan Cargiver di Indonesia, Jurnal MIX, Vol.III, hal.113

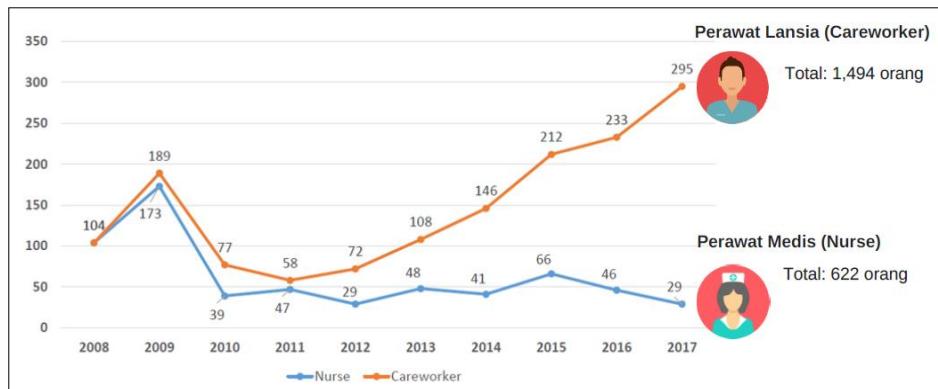
careworker hanya diberi waktu 6 bulan belajar di Indonesia dan 6 bulan belajar di Jepang.¹¹⁸

Berdasarkan diagram di bawah ini, jumlah perbandingan *nurse* dan *careworker* yang dikirim Indonesia ke Jepang mengalami perbedaan dan kondisi yang cenderung sama sejak tahun 2009, dimana jumlah *careworker* cenderung lebih tinggi dibandingkan jumlah *nurse* yang dikirim ke Jepang. Hal ini dikarenakan persyaratan yang diberikan untuk *careworker* lebih ringan dan cenderung tidak memberatkan dibandingkan persyaratan yang diberikan untuk *nurse*. Kemudahan tersebut seperti tidak adanya syarat minimal pengalaman kerja sebagai perawat selama 2 tahun dan tidak perlu mengikuti uji kompetensi bagi perawat yang dilakukan kemenkes yang bekerjasama dengan PPNI saat tahap penyeleksian.¹¹⁹

¹¹⁸Reni K. Arianti. 2013. Pengaruh Profesionalisme, Pelatihan dan Motivasi terhadap Kinerja Nurse dan Cargiver di Indonesia, Jurnal MIX, Vol.IIIhal.113

¹¹⁹BNP2TKI. Pengumuman Pendaftaran Program *G* to *G* ke Jepang untuk penempatan tahun 2017 [Internet] <http://www.bnpt2tki.go.id/read/11178/Pengumuman-Pendaftaran-program-G-to-G-ke-Jepang-untuk-penempatan-tahun-2017.html> diakses pada 12 Januari 2019

**Gambar 4.6 Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Jepang
Tahun 2008-2017**



Sumber : *Fact Sheet* IJEPA 2018

Diagram di atas menunjukkan bahwa jumlah *careworker* cenderung lebih tinggi dibandingkan *nurse*. Pada beberapa kurun waktu jumlah *nurse* dan *careworker* yang dikirim ke Jepang sempat mengalami penurunan, seperti halnya tahun 2010 hingga beberapa periode setelahnya jumlah *nurse* dan *careworker* cenderung sedikit, hal ini dikarenakan beberapa faktor eksternal di luar IJEPA diantaranya, kondisi ekonomi Jepang yang saat itu menurun dikarenakan krisis global serta isu keamanan setelah adanya gempa tsunami tahun 2011.¹²⁰ Namun pada beberapa periode setelahnya hingga tahun 2017, jumlah *careworker* melonjak tinggi sedangkan jumlah *nurse* jauh dibawahnya.

Baik *nurse* maupun *careworker* yang dikirim ke Jepang keduanya harus melalui syarat yang disebut dengan *Kokka Shiken* yang merupakan ujian nasional bagi perawat di Jepang. *Kokka Shiken* merupakan uji kompetensi lanjutan yang berfungsi untuk peningkatan jabatan sebagai

¹²⁰Shun Ohno, “Southeast Asian Nurses and Caregiving Workers Transcending the National Boundaries: An Overview of Indonesian and Filipino Workers in Japan and Abroad”, hal. 547-548

nurse dan *careworker* yang sesuai dengan standar hukum di Jepang untuk mendapatkan kenaikan gaji sesuai dengan standart perawat Jepang.¹²¹ Dengan kata lain, *nurse* dan *careworker* yang lulus pada ujian *Kokka Shiken* tidak lagi dianggap sebagai pekerja magang tidak tetap, serta akan memperoleh gaji yang lebih menjanjikan karena disetarakan dengan perawat Jepang sesuai dengan ketentuan standar perawat Jepang.

Ujian *Kokka Shiken* ini ibarat pisau bermata dua. Disatu sisi *nurse* dan *careworker* yang lolos dalam ujian tersebut akan mendapatkan gaji yang disetarakan dengan standar perawat Jepang sehingga mereka tetap bisa melanjutkan pekerjaan disana dengan periode waktu yang lebih panjang, disisi lain ujian *Kokka Shiken* terbilang berat bagi *nurse* dan *careworker* Indonesia dikarenakan masa pelatihan yang diberikan terbilang sebentar, sedangkan *nurse* dan *careworker* harus mengerjakan materi ujian *Kokka Shiken* dalam bahasa Jepang dan menggunakan huruf kanji.¹²² Sehingga tidak heran 18 dari 20 peserta *Kokka Shiken* dari Indonesia gagal.¹²³ Para *nurse* dan *careworker* yang tidak lolos dalam ujian akan dipulangkan dan berstatus sebagai IJEPA *nurse returnees*.¹²⁴ *Nurse returnees* yang kembali ke Indonesia mengalami situasi susah mencari pekerjaan karena *deskilling*, situasi dimana adanya perbedaan cara

¹²¹Leaflet “Informasi Kerja Program Antar Pemerintah (*G to G*) ke Jepang bagi *Nurse* (*Kangoshi*) dan *Careworker* (*Kaigofukushishi*)”, Direktorat Pelayanan Penempatan Pemerintah Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI.

¹²² Setyowati. "Indonesian Nurses' Challenges for Passing the National Board Examination for Registered Nurse in Japan: Suggestions for Solutions"

¹²³ Ferry Efendi. 2016. *A Comparative Study of the Lived Experiences of Indonesian Caregivers in Japan and the Returnees in Indonesia*, Final Research Report to be Submitted to Sumitomo Foundation Japan

124 *Ibid.*

merawat yang dipelajari di Jepang dan yang diterapkan Indonesia pada umumnya.¹²⁵ Kondisi kembalinya para *nurse returnees* ke negara asal yakni Indonesia semakin menambah tingkat pengangguran.

C.4. Peningkatan daya saing yang diwujudkan melalui MIDECK

Manufacture Industries Development Center (MIDEC) adalah kerja sama teknis dalam rangka peningkatan daya saing industri nasional melalui pelatihan, pengiriman tenaga ahli, kunjungan kerja ke industri, serta seminar yang diatur didalam IJEPA.¹²⁶ Dalam implementasinya, MIDEC difokuskan untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur Indonesia dengan cara membangun berbagai macam ketertinggalan berbagai industri penunjang, diantaranya industri pembuat komponen serta penguatan berbagai fasilitas, seperti balai uji, sistem sertifikasi, pelatihan SDM, pengembangan standar, sistem sertifikasi dan penjaminan kualitas produk, peningkatan teknik produksi, peningkatan manajemen, program pelatihan manajemen SDM.¹²⁷ Implementasi MIDEC pada 5 tahun pertama penerapannya yakni ditahun 2013 hanya berhasil mengimplementasikan 5 sektor dari 13 sektor yang sudah disepakati, diantaranya cetak dan potong metal, otomotif, elektronik, pengelasan, dan

¹²⁵Ferry Efendi. 2016. *A Comparative Study of the Lived Experiences of Indonesian Caregivers in Japan and the Returnees in Indonesia*, Final Research Report to be Submitted to Sumitomo Foundation Japan

¹²⁶Kemenprin. 2018. Midec Belum Optimal untuk Indonesia. <http://www.kemenperin.go.id/artikel/4203/MIDEC-Belum-Optimal-bagi-Indonesia>. diakses pada 10 Januari 2019

¹²⁷ Brian Nova Prathama. 2014. "Implementasi *Indonesia-Japan Economic Partnership (IJEPA)* dalam capacity building melalui MIDEK : Tinjauan Ekonomi Politik" Mahasiswa program S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

konservasi energi.¹²⁸ Dengan kata lain memasuki periode ke 5 tahun, implementasi IJEPA melalui MIDEC belum maksimal.

Sebagai kompensasi disepakatinya MIDEC, Indonesia menerima syarat Jepang mengenai *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS). USDFS merupakan skema kebijakan oleh Indonesia sebagai syarat Jepang terhadap implementasi MIDEC dengan cara pembebasan bea masuk yang mana hanya ditujukan untuk pengembangan *driver sectors*, yaitu *automotive, electronic, heavy equipment* dan *energy*, atau sektor yang berbasis baja yang diimpor dari Jepang.¹²⁹

Dengan adanya pembebasan bea masuk disektor-sektor tersebut, Jepang akan diuntungkan karena biaya produksi mereka terhadap sektor otomotif dan transportasi semakin rendah. Tidak heran jika kemudian produk transportasi buatan Jepang lebih mendominasi dibandingkan dengan produk transportasi buatan Eropa diantaranya, Toyota, Honda, Suzuki dan beberapa merk buatan Jepang lainnya.¹³⁰ Produksi mobil buatan Jepang mengalahkan beberapa merk mobil buatan negara lain dengan perbandingan total produksi yang cukup jauh, misalnya pada tahun 2017 saja Toyota menjual 371.332 unit mobilnya di Indonesia sementara

¹²⁸BS Butarbutar. 2013. *Indonesia Evaluasi Kerja Sama Ekonomi dengan Jepang*, [online]<http://www.antaranews.com/berita/398862/indonesia-evaluasi-kerja-sama-ekonomi-dengan-jepang>, diakses 12 Januari 2019

¹²⁹ Kemenprin.2013.Indonesia *Tingkatkan Daya Saing Industri melalui MIDEK* [Internet] <http://www.kemenperin.go.id/artikel/6538/RI-Jepang-Tingkatakan-Daya-Saing-Industri-Melalui-Kerjasama-MIDEC> diakses pada 12 Januari 2019

¹³⁰Dina Rayanti. 2018. Dominasi Mobil Merk Jepang di Indonesia, Detik.com [Internet] <https://oto.detik.com/mobil/d-4050840/dominasi-mobil-merek-jepang-di-indonesia> diakses pada 12 Januari 2019

Honda mengisi posisi kedua sebanyak 186.859 unit. Angka tersebut jauh berbeda dibandingkan penjualan merek mobil di luar Jepang seperti Hyundai yang hanya berhasil membukukan 1.271 unit mobil sepanjang tahun atau KIA sebanyak 837 unit.¹³¹

Hingga saat ini, implementasi MIDEC terhitung sangat lambat, keuntungan yang signifikan justru diterima Jepang melalui USDFS karena pembebasan bea masuk barang berbasis baja guna menunjang industri otomotif Jepang di Indonesia. Pada tahun 2013 setelah 5 tahun IJEPA diterapkan, Indonesia mengajukan evaluasi terhadap kinerja IJEPA. Evaluasi terhadap kinerja IJEPA yang dimulai sejak tahun 2013 hingga kini masih belum menemukan titik temu dan jawaban atas berbagai persoalan yang dianggap kurang menguntungkan Indonesia, salah satunya MIDEC. Proses evaluasi kinerja IJEPA juga sempat terhenti ditahun 2016, dengan situasi dimana Jepang enggan melanjutkan evaluasi dikarenakan isu tarif produk otomotif dan baja yang diatur dalam USDFS.¹³²

¹³¹Dina Rayanti. 2018. Dominasi Mobil Merk Jepang di Indonesia, Detik.com [Internet] <https://oto.detik.com/mobil/d-4050840/dominasi-mobil-merek-jepang-di-indonesia> diakses pada 12 Januari 2019

¹³²Kemendag.Fact Sheet Indonesia-Japan. 2018.*Economic Partnership Agreement (IJEPA)*

D. Tinjauan konsep *National Interest* dan *Rational Choice* dalam
kepentingan Jepang melalui kerjasama bilateral IJEPA tahun 2008-2018

Suatu negara memutuskan kepentingan nasionalnya tidak terlepas dari pilihan rasional yang menjadi dasar pertimbangan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan konsep *national interest* dan *rational choice* karena dirasa sangat mewakili penelitian yang berkaitan dengan keputusan Jepang untuk mengajak Indonesia membentuk kerjasama bilateral *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) dengan mempertimbangkan segala kemungkinan jangka panjang yang dapat terjadi didalam kerjasama melalui berbagai pemikiran rasional, kemudian menghubungkannya dengan realita IJEPA yang sudah diimplementasikan sejak tahun 2008 hingga tahun 2017.

Pada mulanya, peneliti melihat nilai perdagangan Indonesia Jepang sejak tahun 2008-2017 menunjukkan surplus di Indonesia dan defisit disisi Jepang selaku inisiator. Suatu negara ketika merumuskan kebijakan luar negerinya tentu berdasarkan atas kepentingan nasional yang mereka miliki, dengan pertimbangan berbagai pilihan rasional terhadap apa yang akan negara peroleh setelah merumuskan kebijakan tersebut. Dalam situasi ini, kondisi surplusnya ekspor Indonesia terhadap Jepang dengan nilai pertumbuhan ekspor yang semakin meningkat merupakan salah satu kebijakan Jepang yang sudah dipertimbangkan melalui IJEPA, karena pada dasarnya nilai perdagangan yang demikian akan membantu Jepang dalam memenuhi kebutuhan dalam negerinya, termasuk kebutuhan akan

pasokan energi murah yang notabene dan tidak dimiliki Jepang. Disamping itu, Jepang juga menyematkan kepentingan lain dibalik IJEPA, yakni meningkatkan investasi dari Jepang berupa didirikannya perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi transportasi Jepang di Indonesia, pengiriman tenaga kerja ahli yakni *nurse* dan *careworker* dari Indonesia ke Jepang, serta peningkatan daya saing melalui MIDEC yang secara keseluruhannya juga pada dasarnya lebih menguntungkan pihak Jepang setelah diimplementasikan sejak 2008-2017. Jepang ingin mempertahankan eksistensinya dengan menggunakan dominasi ekonomi dan penguasaan terhadap pasar otomotif Indonesia melaui IJEPA.

Melalui konsep EPA, Jepang mengajak Indonesia untuk menyepakati IJEPA. Jepang mengakomodir kepentingan nasionalnya melalui IJEPA dengan mempertimbangkan kemungkinan jangka panjang. Situasi ini dijelaskan melalui konsep kepentingan nasional dalam perspektif realis. Sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan eksis dalam pembangunan industri terutama disektor otomotif menuntut Jepang untuk terus mempertahankan eksistensinya ditengah persaingan global yang semakin dinamis dan juga kompleks. Untuk mempertahankan eksistensi tersebut negara harus memiliki power yang bisa dibangun melalui kekuatan ekonomi, semakin kuat perekonomian suatu negara semakin besar pula power yang dimiliki negara tersebut. Konsep kepentingan nasional melalui perspektif realis mewakili situasi tersebut. Kepentingan nasional menurut realis dikendalikan oleh beberapa

hal seperti tekanan dalam kompetisi dan didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang serius. Kepentingan nasional adalah mengejar dan memperoleh kekuasaan dengan melalui cara-cara yang bersifat memaksa maupun teknik kerjasama, apapun yang dapat membantu membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain sebagai perwujudan kekuasaan itu sendiri.

Cara berfikir rasional terhadap segala kemungkinan dan keuntungan yang dapat diperoleh Jepang melalui IJEPA, berlaku efektif dirasakan Jepang setelah IJEPA diimplementasikan tahun 2008-2017 dengan tercapainya kepentingan nasional Jepang melalui IJEPA, beberapa kepentingan yang diakomodir melalui IJEPA terlaksana dengan baik dan menguntungkan Jepang, sebagai berikut :

1. Situasi ekspor Indonesia yang selalu surplus dibandingkan ekspor Jepang yang cenderung defisit secara tertulis memang menguntungkan Indonesia, akan tetapi pada realitanya situasi tersebut membuat untung karena terpenuhinya kebutuhan energinya berupa minyak bumi dan batu bara karena ekspor dari Indonesia. IJEPA merupakan sebuah bentuk kerjasama yang memudahkan Jepang untuk mendapatkan pasokan energi yang stabil jumlahnya, karena sebagai negara pengekspor Indonesia tentu melihat adanya pembebasan tarif sebagai keuntungan lebih. Dengan kata lain, IJEPA merupakan wadah bagi negara Jepang untuk mendapatkan pasokan energi dalam jumlah yang cenderung stabil.

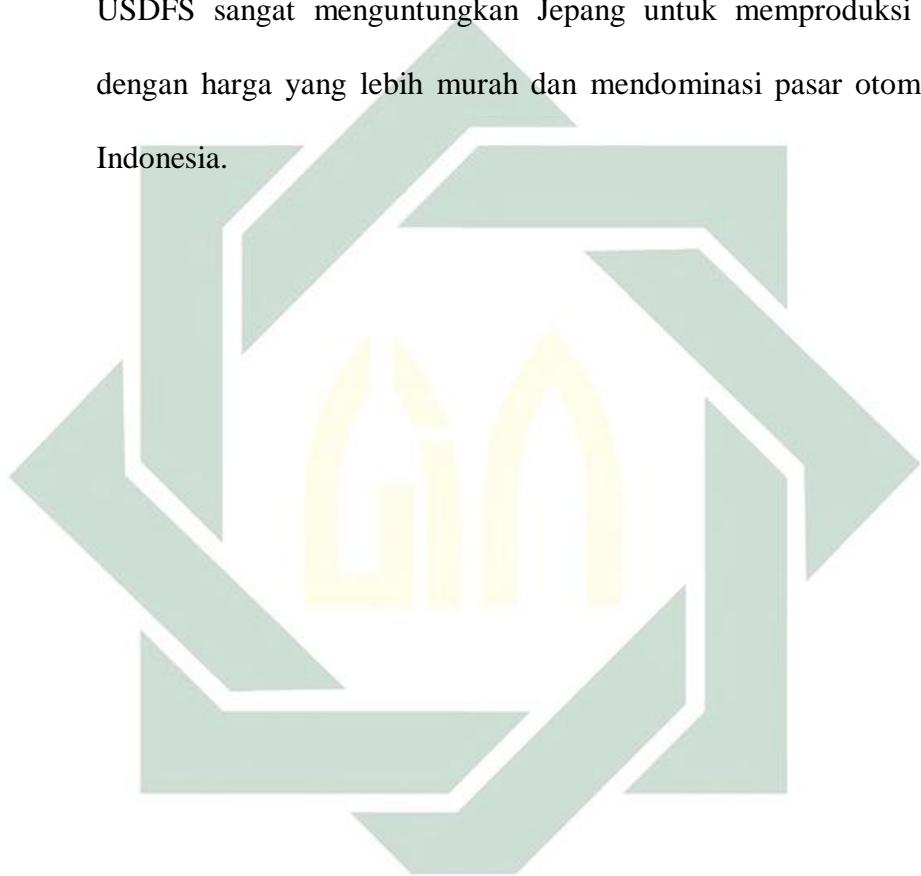
Melalui cara berfikir rasional Jepang mengajak Indonesia menyepakati IJEPA dengan mempertimbangkan akan diperolehnya pasokan energi yang stabil sejalan dengan kepentingan nasionalnya, pada akhirnya implementasi IJEPA lebih banyak menguntungkan Jepang.

2. Meningkatnya lapangan pekerjaan dengan irangi meningkatnya jumlah perusahaan Jepang tentu sangat menguntungkan bagi Jepang. IJEPA menyepakati upaya-upaya untuk meningkatkan kepercayaan perusahaan Jepang untuk berinvestasi ke Indonesia, sejak diimplementasikan terjadi peningkatan mencapai lebih dari 45% perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia, dan mayoritas perusahaan berfokus pada industri otomotif. Disatu sisi, kondisi upah pekerja murah di Indonesia tentu akan sangat menguntungkan pihak Jepang, disisi lain, adanya kebijakan USDFS yang mengatur pembebasan bea masuk untuk komoditi baja seperti alat-alat kelengkapan kendaraan, mobil dan sebagainya akan sangat membantu Jepang untuk menekan biaya produksi mereka. Pada akhirnya, Jepang mampu mendominasi pasar otomotif di Indonesia karena produk andalan mereka dijual dengan harga murah.
3. Kepentingan Jepang didalam IJEPA melalui pengiriman *nurse* dan *careworker*. Pengiriman tenaga kerja perawat ke Jepang pada dasarnya lebih menguntungkan Jepang karena merupakan bentuk strategi Jepang untuk menghadapi permasalahan negaranya yang kelebihan populasi

lansia dan pertumbuhan rendah yang diperkirakan akan terus naik hingga tahun 2025, sebagai solusi permasalahan tersebut Jepang menjanjikan kesempatan kerja bagi perawat Indonesia sebagai *nurse* dan *careworker* dalam IJEPA. Pada realitanya, *careworker* lebih mendominasi dibandingkan *nurse*. Sangat jelas bahwa Jepang lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan *careworker* dibandingkan *nurse* yang dipekerjakan di instansi-instansi kesehatan, selain itu Jepang terhitung tidak begitu fleksibel terhadap nasib jangka panjang baik *nurse* maupun *careworker*. Para *nurse* dan *careworker* yang masuk ke Jepang setelah lulus uji kompetensi pertama akan dipekerjakan dengan gaji yang berbeda dengan perawat Jepang pada umumnya. Para *nurse* dan *careworker* harus mengikuti ujian kompetensi lanjutan yang disebut dengan *Kokka Shiken* jika ingin bekerja lebih lama di Jepang dengan gaji sesuai standar perawat Jepang pada umumnya, banyak *nurse returnees* yang gagal dan kembali ke Indonesia sebagai pengangguran karena adanya *deskilling*. Dengan kata lain, Jepang hanya mementingkan kepentingan nasionalnya dibalik iming-iming lapangan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi di Jepang, tetapi tidak menjamin kepastian keberlangsungan pekerja dalam jangka panjang.

4. Kepentingan Jepang untuk mendominasi pasar otomotif dilakukan melalui salah satu agenda IJEPA yakni MIDEC, berupa program yang berisi tentang seminar maupun pelatihan untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Akan tetapi, Jepang juga mengharapkan kompensasi

berupa diberlakukannya USDFS oleh Indonesia. USDF adalah kebijakan yang harus dilakukan Indonesia untuk membebaskan bea masuk terhadap barang Jepang berbasis baja untuk pengembangan industri Jepang di Indonesia, khususnya industri otomotif. Kebijakan USDFS sangat menguntungkan Jepang untuk memproduksi mobil dengan harga yang lebih murah dan mendominasi pasar otomotif di Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan adanya IJEPA, negara Jepang lebih banyak diuntungkan dibanding Indonesia. Jepang berhasil mengakomodir kepentingannya melalui IJEPA dan mempertahankan eksistensinya di kawasan Asia di tengah persaingan ekonomi global dikarenakan munculnya kompetitor-kompetitor baru yang berpotensi seperti Tiongkok. Hal tersebut dibuktikan dengan melihat implementasi IJEPA tahun 2008-2017 yang diwujudkan melalui beberapa agenda. Kepentingan Jepang terhadap Indonesia di bawah kerangka kerjasama bilateral IJEPA adalah: Pertama, memanfaatkan sumber daya Indonesia berupa minyak bumi dan batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi Jepang. Kedua, menggunakan pekerja Indonesia yang bergerak dibidang *nurse* dan *careworker* untuk mengatasi permasalahan pertumbuhan lansia di Jepang yang diperkirakan akan terus meningkat. Ketiga, meningkatkan investasi di Indonesia dengan pertimbangan pekerja murah sehingga berimplikasi pada biaya produksi yang semakin kecil. Keempat, mengambil keuntungan melalui skema pembebasan bea masuk yang ditujukan untuk pengembangan *driver sector* (USDFS) sebagai kompensasi *Manufacture Industries Development Center* (MIDEC). Selain itu, pola hubungan yang komplementer antara

keduanya, membuat Indonesia kurang mampu mengambil manfaat dari IJEPNA secara maksimal.

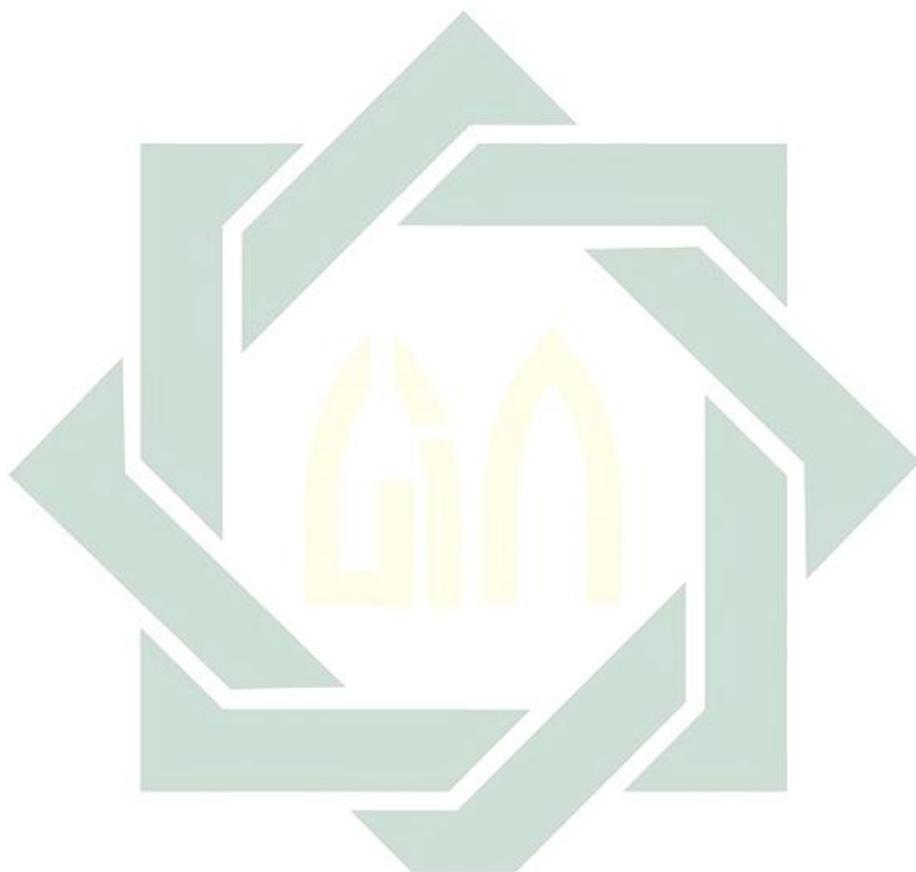
B. Saran

Dalam proses penelitian hingga penulisan laporan skripsi ini, peneliti sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan data dan ketidak sempurnaan peneliti menyampaikan penelitian maupun hasil penelitian, peneliti membuka selebar-lebarnya kesempatan untuk memberi masukan maupun saran yang dapat menyempurnakan penelitian serta menambah wawasan peneliti, agar penelitian bisa lebih sempurna dan bermanfaat bagi yang lain.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang bisa diberikan peneliti untuk pihak Jepang maupun Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Indonesia diharapkan lebih selektif dalam mempertimbangkan berbagai keputusan yang dapat berimplikasi baik dan buruk bagi Indonesia didalam IJEPA.
 2. Kedua negara diharapkan mampu memaksimalkan peluang yang dibuka melalui IJEPA dan mendapatkan keuntungan yang setara.
 3. Jepang diharapkan lebih fleksibel dan pasti dalam mengimplementasikan perjanjian dan segala kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak. Seperti meringankan standar ujian kompetensi *kokka shiken*.

4. Kedua negara diharapkan melangsungkan *general review* sebagai proses evaluasi yang disepakati setiap lima tahun sejak IJEPA diterapkan secara cepat dan efisien.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.A, Perwita & Y. M., Yani,(2005).“*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Audit, D.N. 1965. *Politik Luar Negeri dan Revolusi Indonesia*. Djajasan Pembaruan, Jakarta.

Antonius, Sitepu P. 2011. Studi Hubungan Internasional. Graha Ilmu: Yogjakarta

Bandoro, Bantarto. 1994. *Hubungan luar negeri Indonesia selama Orde Baru*. Centre for Strategic and International Studies Jakarta

Beitz, Charles R. 1968. *Political Theory and International Relations*, New Jersey: Princeton University Press

Burchill, Scoot. 2005. *The National Interest in International Relations Theory*; Palgrave

Coleman, James S.. 1994. *Foundations of Social Theory*; Belnap Press

Clinton, W.D. *The Two Face of National Interest*, Lousiana State University Press, Amerika Serikat, 1994.

Djoned, Marwati Poesponegoro. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia*. Balai Pustaka

Hassan Shadily. *Ensiklopedi Indonesia*. Ichtiar Baru-Van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects.Jakarta, 1984

Jhonson, Doyle P.. 1998. Teori Sosial Modern dan Klasik. PT.Gramedia Pustaka, Jakarta

Kennedy, Paul. 1995. *Menyiapkan Diri Menghadapi abad ke-21*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Lawrence Olson. 1970. *Japan in Postwar Asia*, Praeger Publisher, New York-Washington; London.

Mas'oed, Mohtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional. Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: Pustaka LP3ES

Moleong, Lexy J. 2014. Metode Penelitian Kualitatif,. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

- Nishihara, Masashi. 1994. Sukarno, Ratna Sari Dewi dan Pampasan Perang : Hubungan Indonesia-Jepang 1951-1966. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti

Patilima, Hamid. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Ritzer, George. 2012. Teori Sosiologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rustandi, Ahmad SH dan Zul Afidi Ardian SH. 1988. *Tata Negara Jilid 2*

Shiraishi dan Takashi Shiraishi, "Orang Jepang di Asia Tenggara", Yayasan Obor, Jakarta, 1998

Sugiyono.2010. Memahami penelitian kualitatif. Bandung. ALFABETA

Sharma, Urmila dan Sharma, S.K dalam Michael Invader. 2000. *Principles and Theories in Political Science*. New Delhi: Atlantic Publishers and Distributors.

Wight, Martin & Hedley Bull dalam Scoot Burchill. 2005. *The National Interest in International Relations Theory*; Palgrave

JURNAL

- Alwi, Syafarudin. *IGGI dan Pembatasan Sektor Swasta*. UNISIA 10.XI.IV.1991

Efendi, Ferry.2016, “A Comparative Study of the Lived Experiences of Indonesian Caregivers in Japan and the Returnees in Indonesia”, *Final Research Report to be Submitted to Sumitomo Foundation Japan*

Elster, Jon. 1996. Rationally and the Emotions, *The Economic Journal*, 106(438)

Faris A, Muhammad. 2012. Kebijakan Ketahanan Energi Jepang di abad 21
“Fundamentalisme Negara dan Diversifikasi Sumber Energi”

Gocklas & Sri Sulasmiaty 2017. Analisis Pengaruh Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Terhadap Nilai Perdagangan Indonesia-Jepang.

Ikbar, Yanuar. 2014. Metodologi dan Teori Hubungan Internasional. PT.Refika Aditama, Bandung.

Ingram, David. *What is an economic partnership agreement?* [Internet] <https://smallbusiness.chron.com/economic-partnership-agreement-3888.html> diakses pada 5 Januari 2019

Komala, A. 2008. International Law Making. Jurnal Hukum Internasional – *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*. Vol 5 no 2

K,Reni Arianti. 2013. Pengaruh Profesionalisme, Pelatihan dan Motivasi terhadap Kinerja Nurse dan Cargiver di Indonesia, Jurnal MIX, Vol.III

Ohno, Shun. "Southeast Asian Nurses and Caregiving Workers Transcending the National Boundaries: An Overview of Indonesian and Filipino Workers in Japan and Abroad"

Pangastoeti, Sri. dari Kyuushuu ke Ran'in: *Karayuki-San* dan Prostitusi Jepang di Indonesia (1885-1920"), Humaniora vol.21, Yogyakarta, 2009

Robinson, Thomas W. 1967. *A national Interest Analysis of Sino-Soviet Relations*. Vol.11, no.2 : Published by Wiley on behalf of The International Studies Association

Setiawan, Sigit. 2015 Analisis Dampak IJEPA terhadap Indonesia dan Jepang (Internet)
https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pkrb_03.%20dampak%20ijeпа.pdf diakses pada 24 Oktober 2018

Setyowati. "Indonesian Nurses' Challenges for Passing the National Board Examination for Registered Nurse in Japanese: Suggestions for Solutions"

T.B, Fitri dkk. 2012. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan - Analisis Dampak Indonesia Japan Economic Partnership Agreement terhadap *Price-Cost Margins* Industri Manufaktur Indonesia. Vol. 15 No. 2

MEDIA CETAK ONLINE

BBC Indonesia. 2008. Ekonomi di bawah Orde Baru [Internet] http://www.bbc.co.uk/indonesia/indepth/story/2008/01/080127_suhartoconomy.shtml diakses pada 28 Desember 2018

Butarbutar, BS. 2013. Indonesia Evaluasi Kerja Sama Ekonomi dengan Jepang, [online]<http://www.antaranews.com/berita/398862/indonesia-evaluasi-kerja-sama-ekonomi-dengan-jepang>, diakses 12 Januari 2019

- Khairisa. 2017. RI ikut teken Perjanjian Akhiri Perang Dunia II. [Internet] <https://www.liputan6.com/global/read/3086556/8-9-1951-ri-ikut-teken-perjanjian-yang-akhiri-perang-dunia-ii> diakses pada 27 Desember 2018

Nugroho. 2018. Gerak Cepat Pemuda Siarkan Proklamasi [Internet]. <https://kumparan.com/@kumparannews/gerak-cepat-pemuda-jawa-siarkan-kabar-merdeka-1534478627163643162> diakses pada 27 Desember 2018

Rayanti, Dina. 2018. Dominasi Mobil Merk Jepang di Indonesia, Detik.com [Internet] <https://oto.detik.com/mobil/d-4050840/dominasi-mobil-merek-jepang-di-indonesia> diakses pada 12 Januari 2019

Rizki Nugraha. 2016. Komoditi Ekspor Andalan Indonesia. <https://www.dw.com/id/7-komoditi-ekspor-andalan-indonesia/g-19297445> diakses pada 7 Januari 2019

Vidyf. 2017. Indonesia Sang Negara Boneka. [Internet] <https://geotimes.co.id/opini/indonesia-sang-negara-boneka/> diakses pada 20 Desember 2018

Wawancara Dr. Ken Koyama dalam *Pertamina Energy Outlook 2015* [Internet]

SKRIPSI & TESIS

- Afifah, Nimah. *Politik Luar Negeri Indonesia Era Orde Baru Tinjauan Developing Country suatu Telaah Awal*. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UIN Sunan Kalijaga

Bahri, M.M., 2004. *International Aid for Development? An Overview Japanese ODA to Indonesia*. Makara, Sosial Humaniora

Derliana. 2011. Implementasi *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* Pada Ekspor Komoditas Udang Dan Tuna Dalam Sektor Perikanan Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia, Bandung.

Dhea A, Mentari. Peningkatan daya Saing Indonesia dibidang Keperawatan melalui IJEPA 2008-2013 mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Nova, Brian Prathama. 2014. “*Implementasi Indonesia-Japan Economic Partnership (IJEPA) dalam capacity building melalui MIDEK : Tinjauan*

Ekonomi Politik” Mahasiswa program S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Perdana, Imantri dkk. Konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1963-1966 (*Dampak Terhadap Perekonomian Masyarakat Tanjung Balai Karimun*. Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau.

Rahmah, Nuthaila. 2017. Hubungan Indonesia – Jepang dalam Perjanjian *Indonesia-Japan Economic partnership Agreement di bidang Pertanian*. Skripsi mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial & Politik. Universitas Hasanuddin.

S.R, Bagus Politik Minyak Jepang dan Teori Ekspansi ke Selatan.Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Indonesia

Z, Rifki 2013. Diplomasi ekonomi Jepang terhadap Indonesia melalui *Japan International Cooperation Agency*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

WEBSITE RESMI

Databooks. Volume Eksport Batu Bara Indonesia ke Jepang [Internet] <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/11/volume-ekspor-batu-barabara-indonesia-ke-jepang-2002--2014> diakses pada 10 Januari 2019

Badan Pusat Statistik. Laporan tahun 2008-2017

BNP2TKI. Pengumuman Pendaftaran Program G to G ke Jepang untuk penempatan tahun 2017 [Internet] <http://www.bnptki.go.id/read/11178/Pengumuman-Pendaftaran-program-G-to-G-ke-Jepang-untuk-penempatan-tahun-2017.html> diakses pada 12 Januari 2019

IEA. 2003. *Energy Policies of IEA Countries* Jepang negara anggota IEA (International Energy Agency) mengenai Jepang sebagai negara anggota IEA paling kritis dalam ketersediaan sumber daya alam

Kedutaan besar Jepang di Indonesia. [Internet] terdapat pada [http://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html] diakses pada 12 Maret 2018

Kementerian Keuangan, 2009. *IJEPA (Indonesia Japan Economic Partnership Agreement)*. Jakarta: Kemenkeu

Kemendag. 2015. *Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan.*

Kemendag. 2017. *Fact sheet* Indonesia Jepang (EPA)

Kemenprin. 2018. Midec Belum Optimal untuk Indonesia.
<http://www.kemenperin.go.id/artikel/4203/MIDEC-Belum-Optimal-bagi-Indonesia>. diakses pada 10 Januari 2019

Kemenprin. 2018 <http://www.kemenperin.go.id/artikel/5707/1.500-Perusahaan-Jepang-Siap-Masuk-Indonesia> diakses pada 8 Januari 2019

Kemenprin. 2013. Indonesia Tingkatkan Daya Saing Industri melalui MIDEC [Internet] <http://www.kemenperin.go.id/artikel/6538/RI-Jepang-Tingkatan-Daya-Saing-Industri-Melalui-Kerjasama-MIDEC> diakses pada 12 Januari 2019

Ministry of Foreign Affairs of Japan (MOFA). “*JIEPA-Joint Study Group Report*”.

MOF. *Japan's Economic Partnership Agreement.* 2008. [Internet] http://www.customs.go.jp/english/epa/files/japans_epa.pdf diakses pada 5 Juni 2018

WIRA. 2015. Sejarah Lahirnya TNI Indonesia [Internet] [www.kemhan.co.id](http://www.kemhan.go.id)
diakses pada 20 Desember 2018

World Trade Organization. Legal Text GATT 1947. Part 1 Article 1

World bank data tahun 2010